



Laporan Perekonomian Provinsi Aceh

FEBRUARI 2026

KPw BI Provinsi Aceh

VISI

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia Maju.

MISI

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia

Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku "Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2026" ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi baik untuk internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologi yang terjadi di bulan November 2025. Pertumbuhan tersebut juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera maupun nasional. Dari sisi penawaran, penurunan pertumbuhan berasal dari menurunnya kinerja Lapangan Usaha (LU) yang terdampak langsung oleh bencana yaitu LU Sumber Pertanian, LU Perdagangan, LU Pertambangan, serta LU Transportasi dan Perdagangan. Sementara di sisi permintaan, penurunan pertumbuhan bersumber dari menurunnya Konsumsi Rumah Tangga dan kinerja ekspor.
2. Tingkat inflasi Provinsi Aceh yang diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 6,71% (yoy) pada triwulan IV 2025. Capaian tersebut meningkat dari posisi triwulan sebelumnya yang terealisasi sebesar 4,45% (yoy). Berdasarkan rincian kelompok pengeluarannya, pergerakan inflasi pada triwulan pelaporan terutama didorong oleh tingginya kontribusi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
3. Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III 2025 tetap terjaga, tercermin dari rendahnya Non Performing Financing (NPF) di tengah kinerja pembiayaan yang tercatat tumbuh 8,16% (yoy). Lebih lanjut, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 3,05% (yoy). Di sisi lain, rasio pembiayaan untuk UMKM tercatat sebesar 27,05%.
4. Pada triwulan IV tahun 2025, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi net outflow pada triwulan laporan. Sementara metode pembayaran non tunai seperti, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.
5. Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2026 secara keseluruhan diperkirakan tumbuh terbatas pada kisaran 3,09%-3,69% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,79%.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Februari 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Agus Chusaini
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM	2
1.2. SISI PERMINTAAN	3
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	7
BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	13
2.1. GAMBARAN UMUM.....	14
2.2. KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	14
2.3. KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.....	16
BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	19
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI	20
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI	20
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN I 2026	24
3.4. INFLASI SPASIAL	26
3.5. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH	27
BAB 4. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM.....	28
4.1. KONDISI UMUM	29
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN	30
4.3. STRATEGI DALAM MENDORONG PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM DI ACEH	33
BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH	35
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI	36
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI.....	36
5.3. KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB).....	39
5.4. PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DAN PKH.....	40
BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN	42
6.1. KETENAGAKERJAAN.....	43
6.2. KEMISKINAN.....	45
BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	47
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI	48
7.2. PROSPEK INFLASI	50
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN	51
DAFTAR ISTILAH.....	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan IV 2025	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi	3
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan IV 2025	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	4
Grafik 1.5 Perkembangan Pembiayaan Konsumsi	4
Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	4
Grafik 1.7 Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan	4
Grafik 1.8 Pertumbuhan PMTB	5
Grafik 1.9 Perkembangan Pembiayaan Investasi	5
Grafik 1.10 Pertumbuhan Ekspor Barang & Jasa	5
Grafik 1.11 Perkembangan Ekspor Batubara	6
Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh	6
Grafik 1.13 Pertumbuhan Impor Barang & Jasa	6
Grafik 1.14 Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri	7
Grafik 1.15 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan IV 2025	7
Grafik 1.16 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	7
Grafik 1.17 Perkembangan Produksi Padi	8
Grafik 1.18 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	8
Grafik 1.19 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan.....	8
Grafik 1.20 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan	8
Grafik 1.21 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	9
Grafik 1.22 Perkembangan Pengadaan Semen	9
Grafik 1.23 Pertumbuhan PMTB	9
Grafik 1.24 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan	10
Grafik 1.25 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan	10
Grafik 1.26 Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	10
Grafik 1.27 Perkembangan Penumpang Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue	10
Grafik 1.28 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	11
Grafik 1.29 Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan	11
Grafik 1.30 Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin	11
Grafik 1.31 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara	11
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh	16
Grafik 3.1 Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan IV 2025.....	20
Grafik 3.2 Perkembangan Harga Emas Dunia	25
Grafik 3.3 Perkembangan Survei Konsumen	25
Grafik 3.4 Pergerakan Inflasi Kab/Kota IHK di Aceh (% , yoy)	26
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)	29
Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga	29
Grafik 4.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek).....	29

Grafik 4.4 Perkembangan <i>Non-Performing Financing</i> (Berdasarkan Lokasi Bank)	30
Grafik 4.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)	30
Grafik 4.6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek).....	30
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank).....	30
Grafik 4.8 Perkembangan DPK berdasarkan Jenis.....	31
Grafik 4.9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan.....	31
Grafik 4.10 Perkembangan DPK Perseorangan	31
Grafik 4.11 Perkembangan DPK Pemerintah.....	31
Grafik 4.12 Perkembangan DPK Korporasi	32
Grafik 4.13 Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek).....	32
Grafik 4.14 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan.....	32
Grafik 4.15 Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha	33
Grafik 4.16 Perkembangan Pembiayaan UMKM	33
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas (Rp Triliun).....	36
Grafik 5.2 Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	36
Grafik 5.3 Temuan Uang Palsu	36
Grafik 5.4 Perkembangan Nominal SKNBI	37
Grafik 5.5 Perkembangan Volume SKNBI	37
Grafik 5.6 Perkembangan Nominal BI-RTGS	37
Grafik 5.7 Perkembangan Volume BI-RTGS	37
Grafik 5.8 Transaksi ATM Debit	38
Grafik 5.9 Transaksi Kartu Kredit	38
Grafik 5.10 Perkembangan Transaksi UE	38
Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS	39
Grafik 5.12 Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS	39
Grafik 5.13 Transaksi KUPVA BB	39
Grafik 5.14 Disagregasi Transaksi UKA	40
Grafik 5.15 Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)	40
Grafik 5.16 Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)	41
Grafik 5.17 Perkembangan Program Sembako (Nominal)	41
Grafik 5.18 Perkembangan Program Sembako (KPM)	41
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera	43
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	45
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Wilayah Sumatera	45
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan IV 2025.....	14
Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan IV 2025.....	15
Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan IV 2025	16
Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan IV 2025	17
Tabel 2.6 Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan IV 2025	18
Tabel 2.7 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan IV 2025.....	18
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang dan Jasa.....	20
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	20
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	21
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	22
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga.....	22
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan	22
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	22
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan	23
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	23
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan	24
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	24
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.....	24
Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh	25
Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe	25
Tabel 3.15 Andil Inflasi di Kota Meulaboh	27
Tabel 3.16 Andil Inflasi di Aceh Tamiang	27
Tabel 3.17 Andil Inflasi di Aceh Tengah	27
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	43
Tabel 6.2 Perkembangan TPT	43
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	43
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan	44
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan	44
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani	44
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	46
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan.....	46
Tabel 7.1 <i>Global Economic Growth Outlook</i>	48

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. PDRB

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun)

Sektoral (Rp Triliun)	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,80	10,19	10,03	11,61	10,49	9,83	10,07	11,74	10,58	10,51	10,71	11,83
Pertambangan dan Penggalian	2,47	2,57	2,72	2,57	2,62	3,01	2,91	2,95	3,11	3,04	3,02	2,42
Industri Pengolahan	1,49	1,60	1,61	1,67	1,56	1,62	1,66	1,71	1,65	1,73	1,75	1,73
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Konstruksi	3,15	3,20	3,56	4,11	3,27	3,47	3,78	4,11	3,27	3,46	3,77	3,76
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,74	5,56	5,69	6,27	5,83	5,84	5,92	6,27	6,18	6,19	6,28	6,26
Transportasi dan Pergudangan	2,34	2,49	2,47	2,43	2,59	2,88	2,95	2,94	2,84	3,26	3,10	2,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53	0,55	0,56	0,59	0,55	0,55	0,59	0,59	0,58	0,59	0,64	0,58
Informasi dan Komunikasi	1,63	1,63	1,62	1,63	1,64	1,65	1,70	1,64	1,64	1,70	1,81	1,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,56	0,37	0,37	0,57	0,56	0,57	0,59	0,57	0,56	0,57	0,59	0,64
Real Estate	1,48	1,48	1,62	1,52	1,56	1,56	1,62	1,59	1,57	1,65	1,74	1,63
Jasa Perusahaan	0,23	0,22	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,23	0,25	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,78	3,25	3,13	3,25	3,03	3,48	3,33	3,49	3,27	3,47	3,34	3,59
Jasa Pendidikan	0,97	1,03	0,97	0,94	0,99	1,04	1,04	1,01	1,00	1,06	1,11	1,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,20	1,26	1,33	1,21	1,13	1,28	1,38	1,33	1,22	1,32	1,37	1,30
Jasa lainnya	0,57	0,61	0,62	0,55	0,57	0,63	0,64	0,60	0,60	0,64	0,64	0,60
PDRB	35,01	36,09	36,61	39,23	36,70	37,72	38,50	40,85	38,28	39,54	40,21	40,19

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (% , yoy)

Sektoral Growth (% , yoy)	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75%	5,66%	7,70%	8,54%	7,04%	-3,55%	0,38%	1,11%	0,91%	6,93%	6,36%	0,85%
Pertambangan dan Penggalian	-6,21%	-5,28%	-1,82%	-6,10%	5,90%	17,24%	6,86%	14,68%	19,02%	1,12%	3,79%	-17,79%
Industri Pengolahan	4,40%	-4,90%	-2,89%	-1,97%	4,69%	1,50%	2,92%	2,81%	5,49%	6,50%	5,68%	1,07%
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	4,92%	7,46%	7,94%	8,85%	9,22%	4,86%	4,49%	3,93%	-4,77%	0,53%	5,24%	-11,71%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,78%	4,84%	5,31%	2,00%	6,44%	0,31%	0,89%	0,25%	1,14%	5,82%	0,04%	-8,61%
Konstruksi	3,60%	7,84%	1,36%	2,65%	3,90%	8,54%	6,02%	0,05%	-0,11%	-0,28%	-0,07%	-8,42%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,72%	5,53%	9,68%	10,23%	1,68%	4,91%	3,96%	-0,02%	5,87%	6,13%	6,28%	-0,06%
Transportasi dan Pergudangan	3,77%	10,41%	9,47%	6,27%	10,65%	15,69%	19,46%	21,12%	9,76%	13,37%	5,09%	-3,60%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,32%	7,09%	5,38%	9,16%	3,76%	0,97%	6,36%	0,34%	6,26%	5,97%	7,78%	-0,61%
Informasi dan Komunikasi	11,08%	8,01%	0,18%	0,90%	0,45%	1,13%	5,36%	0,50%	0,03%	2,96%	6,27%	-1,97%
Jasa Keuangan dan Asuransi	-6,89%	-17,30%	-26,95%	5,14%	-0,35%	52,01%	58,69%	0,29%	0,34%	0,96%	0,64%	13,56%
Real Estate	4,06%	3,89%	2,09%	4,72%	5,09%	4,95%	0,10%	4,32%	1,13%	6,45%	7,28%	2,89%
Jasa Perusahaan	4,07%	-5,62%	-2,31%	-0,02%	2,79%	6,77%	7,38%	0,54%	0,60%	-2,24	-1,88%	1,52%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,66%	6,81%	-5,78%	-0,39%	9,08%	7,17%	6,39%	7,48%	7,81%	-0,22	0,26%	2,91%
Jasa Pendidikan	2,18%	7,76%	6,76%	-8,47%	1,72%	1,65%	6,76%	7,71%	0,73%	2,28	6,67%	4,10%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,58%	-2,02%	8,69%	-3,48%	-5,74%	1,39%	3,70%	9,40%	7,99%	3,46	-0,30%	-1,30%
Jasa lainnya	5,75%	9,14%	8,49%	-0,81%	0,25%	3,10%	4,09%	9,12%	4,69%	3,15	0,64%	-0,07%
PDRB	4,64%	4,37%	3,78%	4,15%	4,82%	4,54%	5,17%	4,15%	4,59%	4,82%	4,46%	-1,61%

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran (Rp Triliun)

Komponen (Rp Triliun)	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
- Konsumsi Rumah Tangga	19,43	19,98	19,99	20,03	20,39	20,83	20,76	20,89	21,41	21,86	21,76	20,31
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,67	0,67	0,67	0,83	0,87	0,75	0,80	0,89	0,86	0,86	0,79	0,93
- Konsumsi Pemerintah	3,39	5,91	5,83	7,17	4,15	6,36	6,19	8,10	4,48	5,76	5,83	7,87
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11,49	11,73	12,01	12,32	11,58	12,49	12,82	13,09	11,57	12,22	12,78	12,63
- Perubahan Inventori	0,37	-0,34	0,42	-0,16	0,32	-0,12	0,13	-0,11	0,67	0,06	-0,07	-0,07
- Total Ekspor	2,06	1,60	1,24	1,34	18,05	18,21	21,61	23,73	22,34	21,41	22,37	22,28
- Total Impor	0,33	0,13	0,30	0,69	18,66	20,78	23,81	25,75	22,94	22,65	23,25	23,58
PDRB	35,01	36,09	36,61	39,23	36,70	37,72	38,50	40,85	38,38	39,54	40,21	40,19

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran (% , yoy)

Komponen (Rp Triliun)	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
- Konsumsi Rumah Tangga	3,14%	3,31%	4,06%	5,80%	4,93%	4,24%	3,85%	4,32%	4,99%	4,97%	4,85%	-2,79%
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	5,14%	4,81%	0,59%	21,88%	29,34%	10,67%	18,95%	7,51%	-1,11%	16,32%	-1,44%	5,85%
- Konsumsi Pemerintah	0,86%	10,19%	1,41%	-8,70%	21,10%	6,89%	5,36%	12,44%	7,99%	-9,40%	-5,62%	-2,86%
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,52%	7,82%	5,46%	4,76%	0,77%	6,36%	5,95%	5,49%	-0,11%	-2,13%	-0,29%	-3,52%
- Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ekspor Luar Negeri	-0,32%	12,31%	18,02%	17,75%	10,14%	-3,74%	7,68%	11,31%	23,75%	17,62%	3,50%	-6,09%
- Impor Luar Negeri	-0,52%	12,35%	19,41%	12,71%	11,59%	-0,37%	5,75%	14,91%	22,94%	8,99%	-2,36%	-8,41%
PDRB	4,64%	4,37%	3,78%	4,15%	4,82%	4,54%	5,17%	4,15%	4,59%	4,82%	4,46%	-1,61%

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

B. Inflasi

Inflasi ⁴ (% , yoy)	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Banda Aceh	5,32	2,70	1,40	1,53	2,52	2,07	1,84	2,16	1,36	2,63	3,67	6,10
Lhokseumawe	5,35	2,69	2,55	1,56	2,79	2,97	2,11	2,79	1,63	2,07	4,19	5,56
Meulaboh	6,27	2,69	2,10	1,42	4,39	3,94	2,40	3,29	1,46	3,07	4,63	5,56
Aceh Tamiang					3,38	3,14	0,99	1,77	1,28	1,33	4,80	7,13
Aceh Tengah					4,51	4,78	0,47	1,63	2,02	1,97	5,80	8,90
Provinsi Aceh	5,46	2,70	1,83	1,53	3,25	3,09	1,50	2,17	1,53	2,19	4,45	6,71

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

C. Perbankan

Indikator Umum

Indikator	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Aset (Rp Triliun)	51,04	52,03	53,77	57,84	56,03	57,67	59,99	63,93	61,30	62,46	63,20	61,89
Pertumbuhan (yoy)%	2,35	-1,66	2,26	8,68	9,78	10,85	11,57	10,54	9,41	8,31%	5,35%	1,94%
DPK (Rp Triliun)	38,98	38,86	39,87	41,93	41,39	43,35	44,70	45,67	43,33	44,77	46,05	44,98
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56	12,11	8,92	4,67	3,27%	3,05%	-1,51%
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	35,42	36,10	37,48	38,57	39,06	40,80	42,51	43,98	44,49	45,04	45,98	47,05
Pertumbuhan (yoy)%	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04	13,45	14,04	13,89	10,40%	8,16%	6,97%
FDR %	90,87	92,90	94,02	92,00	94,38	94,14	95,14	96,32	102,67	100,60	99,83	104,61
NPF-gross %	1,82	1,96	1,80	1,57	1,68	1,61	1,64	1,79	1,95	2,06%	2,05%	2,22%
NPF-Nominal (Rp Triliun)	0,64	0,71	0,67	0,61	0,66	0,66	0,70	0,78	0,86	0,92	0,94	1,04

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

⁴ SBH 2022

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total (Rp Triliun)	38,98	38,86	39,87	41,93	41,39	43,35	44,70	45,67	43,33	44,77	46,06	44,98
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56	12,11	8,92	4,67	3,27	3,05	-1,51
Giro (Rp Triliun)	6,90	6,73	8,19	5,70	7,92	8,81	10,51	6,00	6,56	7,41	8,47	6,98
Pertumbuhan (yoy)%	-34,94	-27,23	12,33	-9,66	14,71	30,85	28,41	5,15	-17,11	-15,91	3,05	16,38
Tabungan (Rp Triliun)	21,55	22,52	22,07	24,99	22,99	24,35	24,19	27,11	25,63	25,51	25,67	30,02
Pertumbuhan (yoy)%	6,27	4,97	3,43	4,33	6,71	8,12	9,60	8,50	11,49	4,79	6,16	10,74
Deposito (Rp Triliun)	10,53	9,61	9,62	11,24	10,48	10,19	10,00	12,56	11,12	11,85	11,90	7,97
Pertumbuhan (yoy)%	38,94	-7,63	-13,23	19,87	-0,47	6,08	3,98	11,76	6,16	16,25	19,10	-36,51

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Kredit (Rp Triliun)	35,42	36,1	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52	43,98	44,49	45,04	45,98	47,04
Pertumbuhan (yoy) %	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04	13,45	14,02	13,89	10,40	8,16	6,97
Modal Kerja (Rp Triliun)	6,51	66,14	6,75	6,82	6,52	7,19	7,43	7,29	7,03	6,88	6,84	6,55
Pertumbuhan (yoy)%	-11,27	-12,79	-7,06	0,14	0,05	8,65	10,07	6,89	8,20	-4,00	-7,84	-10,18
Investasi (Rp Triliun)	4,18	4,56	5,25	5,63	5,88	6,30	6,77	7,52	7,74	7,74	7,97	8,14
Pertumbuhan (yoy)%	52,56	53,45	59,27	55,26	40,41	38,20	28,91	33,57	31,62	22,85	17,80	8,27
Konsumsi (Rp Triliun)	14,72	24,92	25,48	26,12	26,67	27,32	28,32	29,16	29,70	30,40	31,16	32,34
Pertumbuhan (yoy)%	13,25	12,1	11,33	9,77	7,87	9,60	11,15	11,63	11,37	11,31	10,04	10,92

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Kredit (Rp Triliun)	48,38	48,97	49,88	49,91	48,66	49,76	51,11	51,87	52,64	51,87	52,90	53,15
Pertumbuhan (yoy) %	2,49	2,65	5,91	1,25	0,57	1,61	2,46	4,66	8,21	4,27	3,53	2,93
Modal Kerja (Rp Triliun)	12,07	12,62	12,47	12,15	11,42	11,77	11,82	12,87	11,52	10,31	10,29	9,32
Pertumbuhan (yoy)%	13,98	-7,61	1,84	-5,79	-5,42	-6,78	-5,22	1,98	1,02	-12,32	12,82	16,79
Investasi (Rp Triliun)	9,75	9,62	10,15	9,82	8,77	8,91	9,23	9,37	9,85	9,65	9,94	10,08
Pertumbuhan (yoy)%	8,80	2,30	5,79	-4,13	-10,16	-7,43	-9,15	-8,53	12,38	8,35	7,82	4,27
Konsumsi (Rp Triliun)	26,55	16,72	27,26	27,94	28,47	29,08	30,06	30,38	31,26	31,90	32,65	33,75
Pertumbuhan (yoy)%	9,69	8,49	7,93	6,83	7,03	8,83	10,29	10,74	9,81	9,73	8,64	9,68

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	1,74	1,92	2,20	2,32	2,33	3,01	3,28	3,44	3,50	3,48	3,58	3,60
Perikanan	0,30	0,29	0,30	0,30	0,32	0,31	0,31	0,30	0,28	0,28	0,27	0,25
Pertambangan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,13	0,11	0,13	0,19	0,19	0,27
Ind, Pengolahan	1,06	1,16	1,24	1,30	1,31	1,34	1,34	1,55	1,48	1,33	1,30	1,34
Listrik, Gas & Air	0,06	0,07	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,91	0,12
Konstruksi	0,51	0,58	0,62	0,62	0,54	0,57	0,54	0,52	0,46	0,59	0,61	0,51
Perdagangan	5,26	5,29	5,47	5,59	5,52	5,77	6,04	6,25	6,21	6,08	6,08	5,90
Hotel & Restoran	0,31	0,35	0,41	0,44	0,47	0,51	0,53	0,56	0,62	0,63	0,65	0,66
Transportasi, Gudang & Kom,	0,21	0,22	0,23	0,26	0,27	0,28	0,31	0,33	0,34	0,33	0,32	0,31
Perantara Keuangan	0,14	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,06	0,06
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	0,20	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,27	0,26	0,25	0,26
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,23	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31	0,35	0,37	0,38	0,42	0,45	0,46
Jasa Kemasyarakatan	0,54	0,61	0,71	0,77	0,77	0,81	0,82	0,83	0,82	0,79	0,79	0,77
Jasa Perseorangan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	24,72	24,93	25,48	26,12	26,67	27,32	28,32	29,16	29,70	30,41	31,16	32,34
Total	35,42	36,10	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52	43,98	44,48	45,04	45,98	47,04

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	2,97	3,79	4,05	4,12	4,15	4,58	4,56	4,77	4,79	4,74	4,86	4,89
Perikanan	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,31	0,31	0,28	0,28	0,27	0,26
Pertambangan	3,59	2,47	2,27	2,42	1,48	1,16	1,35	1,81	1,78	0,41	0,43	0,49
Ind, Pengolahan	3,43	4,13	3,97	3,86	4,30	4,43	4,22	3,22	3,70	3,93	3,96	2,91
Listrik, Gas & Air	0,33	0,27	0,33	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,40	0,39	0,86
Konstruksi	0,78	0,82	0,93	0,92	0,89	0,86	0,94	0,88	0,86	0,92	0,96	0,89
Perdagangan	6,67	6,66	6,85	6,34	6,27	6,48	6,72	6,88	6,90	6,52	6,52	6,25
Hotel & Restoran	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67	0,67	0,68	0,69
Transportasi, Gudang & Kom,	0,30	0,30	0,36	0,38	0,38	0,38	0,36	0,38	0,38	0,40	0,38	0,35
Perantara Keuangan	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,04	0,10	0,11
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	2,10	2,01	1,92	1,52	0,26	0,27	0,29	0,30	0,30	0,29	0,27	0,27
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,25	0,26	0,29	0,32	0,32	0,33	0,36	0,38	0,39	0,43	0,45	0,46
Jasa Kemasyarakatan	0,56	0,62	0,73	0,78	0,78	0,82	0,84	0,85	0,84	0,81	0,80	0,78
Jasa Perseorangan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	26,55	26,72	27,26	27,94	28,47	29,08	30,06	30,77	31,26	31,90	32,65	33,75
Total	48,38	48,97	49,88	49,91	48,66	49,76	51,11	51,64	52,64	51,87	52,90	53,15

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2025 tercatat berkontraksi sebesar -1,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,46% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologi yang terjadi di bulan November 2025. Pertumbuhan tersebut juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera maupun nasional. Dari sisi penawaran, penurunan pertumbuhan berasal dari menurunnya kinerja Lapangan Usaha (LU) yang terdampak langsung oleh bencana yaitu LU Pertanian, LU Perdagangan, LU Pertambangan, serta LU Transportasi dan Perdagangan. Sementara di sisi permintaan, penurunan pertumbuhan bersumber dari menurunnya Konsumsi Rumah Tangga dan kinerja ekspor.

Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi agregat belanja dan pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan IV 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

Kinerja fiskal pemerintah daerah di Provinsi Aceh hingga akhir triwulan IV 2025 mencatatkan penurunan secara agregat, baik pada pendapatan maupun belanja, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp30,85 triliun atau mencapai 75,13% dari pagu yang ditetapkan. Sementara itu, dari sisi pendapatan, total realisasi Provinsi Aceh sepanjang triwulan IV 2025 sebesar Rp32,39 triliun atau setara dengan 81,12% dari total pagu.

Perkembangan Inflasi Daerah

Tingkat inflasi Provinsi Aceh berada di level 6,71% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,45% (yoy).

Tingkat inflasi Provinsi Aceh berada di level 6,71% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dari posisi triwulan sebelumnya yang terealisasi sebesar 4,45% (yoy). Inflasi terutama didorong oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau disebabkan oleh bencana hidrometeorologi yang mengganggu produksi pertanian dan terhambatnya jalur distribusi.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 masih terjaga di tengah terjadinya bencana hidrometeorologi. Hal ini tercermin dari masih positifnya pertumbuhan pembiayaan dengan kualitas yang baik seiring masih rendahnya Non Performing Financing (NPF). Selain itu, inklusitas pembiayaan mendorong perkembangan yang baik tercermin dari rasio pembiayaan untuk UMKM yang tercatat sebesar 26,03%. Namun demikian, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,51% (yoy).

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan IV 2025, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh.

Pada triwulan IV tahun 2025, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi net outflow pada triwulan laporan. Sementara metode pembayaran non tunai seperti, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan Aceh mengalami pada triwulan IV 2025 menunjukkan perbaikan, di tengah dampak bencana hidrometeorologi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada bulan November 2025 diikuti oleh angka kemiskinan yang juga mengalami penurunan pada bulan November 2025. Aktivitas perekonomian yang tetap berjalan, serta dukungan program bantuan dan pemulihan pascabencana, turut berperan dalam menjaga daya beli dan keberlangsungan pendapatan masyarakat.

Prospek Perekonomian

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2026 secara keseluruhan diperkirakan tumbuh membaik pada kisaran 3,09%-3,69% (yoy) dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,79% (yoy)

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2026 secara keseluruhan diperkirakan tumbuh membaik pada kisaran 3,09%-3,69% (yoy) dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,79% (yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh seiring dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Membaiknya pertumbuhan terutama didorong oleh peningkatan kinerja sektor konstruksi, seiring dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana, serta peningkatan kinerja transportasi dan perdagangan seiring dengan pulihnya jalur distribusi yang terdampak. Membaiknya kinerja perekonomian juga ditopang oleh terjaganya inflasi Provinsi Aceh pada tahun 2026 yang diperkirakan berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Terjaganya inflasi didukung pelaksanaan strategi pengendalian inflasi TPID melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).



BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologi yang terjadi di bulan November 2025. Pertumbuhan tersebut juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera maupun nasional. Dari sisi penawaran, penurunan pertumbuhan bersumber dari menurunnya kinerja Lapangan Usaha (LU) yang terdampak langsung oleh bencana yaitu LU Pertanian, LU Perdagangan, LU Pertambangan, serta LU Transportasi dan Perdagangan. Sementara pada sisi permintaan, penurunan pertumbuhan bersumber dari menurunnya Konsumsi Rumah Tangga dan kinerja ekspor.

1.1. Gambaran umum

Perekonomian Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar -1,61% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,46% (yoy) karena dampak bencana hidrometeorologi. Dari sisi penawaran, berkontraksinya pertumbuhan Aceh disebabkan oleh lebih rendahnya kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, serta berkontraksinya LU Pertambangan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Transportasi dan Pergudangan. Sementara itu pada sisi permintaan, berkontraksinya perekonomian Aceh disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga dan ekspor.

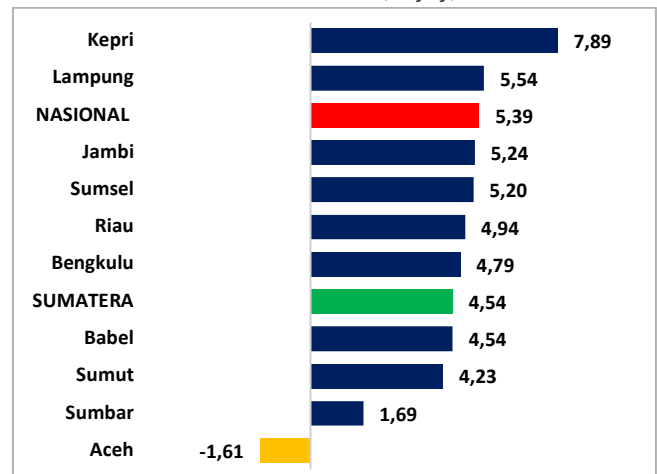
Untuk keseluruhan tahun 2025, perekonomian Aceh masih tumbuh positif sebesar 2,97% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,66% (yoy). Perlambatan pertumbuhan secara tahunan disebabkan oleh berkontraksinya pertumbuhan pada triwulan IV karena bencana, terbatasnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2025, serta faktor *base effect* tingginya pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 yang didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian pada saat Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, Pemilu, dan Pilkada.

Kinerja Perekonomian Triwulan IV 2025

Bencana yang melanda tiga provinsi pada pertengahan triwulan IV 2025 berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera sehingga berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,04% (yoy). Kendati demikian, ekonomi Sumatera pada triwulan laporan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,90% (yoy). Melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera sebagai dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi tiga Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (Grafik 1.1).

Aceh menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi karena dampak bencana. Di antara tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi, Provinsi Aceh merupakan daerah yang mengalami dampak bencana terbesar. Sehingga mengalami pertumbuhan yang negatif, jauh lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera
Triwulan IV 2025 (% , yoy)



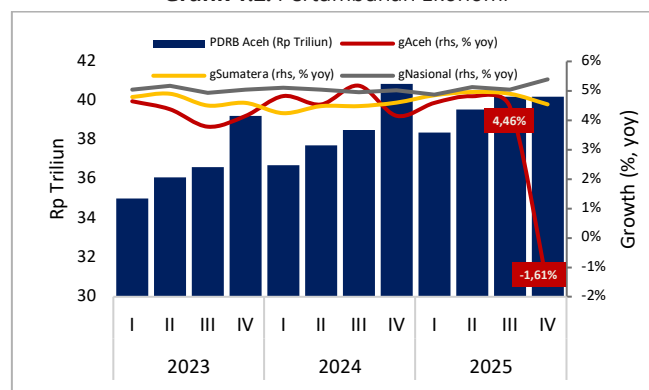
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dari sisi penawaran, berkontraksinya pertumbuhan ekonomi Aceh disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan LU Pertanian, serta berkontraksinya LU strategis lainnya yang memiliki pangsa besar terhadap perekonomian seperti LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Transportasi dan Pergudangan. Kinerja sektor pertanian tumbuh lebih rendah karena bencana hidrometeorologi, namun masih tumbuh positif ditopang oleh kinerja subsektor perkebunan utamanya di daerah yang tidak terdampak bencana secara langsung. Di sisi lain, terputusnya jalur distribusi utama serta terputusnya jembatan penghubung antar kabupaten juga turut mengakibatkan kontraksi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Transportasi dan Pergudangan.

Sementara dari sisi permintaan, berkontraksinya laju pertumbuhan bersumber dari kontraksi pada kinerja konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan IV mengalami kontraksi seiring dengan menurunnya konsumsi masyarakat

terdampak bencana yang mencapai 2.584.067 orang di 18 Kabupaten/Kota di Aceh. Selain itu, perlambatan pada kinerja ekspor disebabkan oleh turunnya permintaan batubara dari India karena kebijakan *frontloading* pada semester I 2025 serta tidak tercapainya target konsumsi energi India periode tersebut.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kontribusi Provinsi Aceh terhadap ekonomi Sumatera masih terbatas. Pada triwulan IV 2025, kontribusi Provinsi Aceh terhadap ekonomi Sumatera sebesar 4,90%, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Kontribusi tersebut berada di atas Bengkulu (2,13%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,2%). Adapun provinsi dengan kontribusi terbesar ke perekonomian Sumatera adalah Sumatera Utara (23,54%), Riau (22,88%), dan Sumatera Selatan (13,71%).

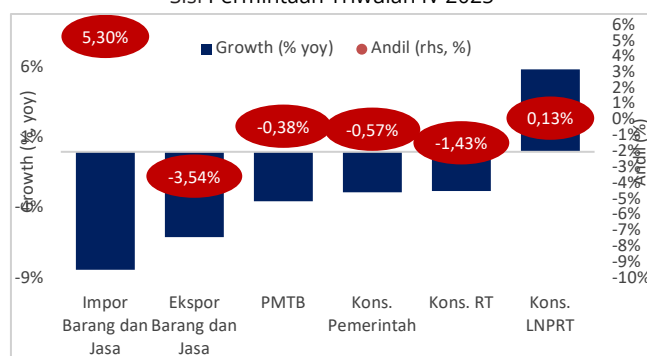
1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, terkontraksinya ekonomi bersumber dari menurunnya seluruh komponen permintaan kecuali konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR). Pada triwulan IV 2025, konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar -1,43% (Grafik 1.3). Menurunnya konsumsi rumah tangga utamanya diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat di 18 Kabupaten/Kota. Di sisi lain, kinerja ekspor tercatat mengalami kontraksi sebesar -6,09% (yoy) yang bersumber dari menurunnya kinerja ekspor batubara dan kopi.

Selain dari itu, kontraksi pertumbuhan juga turut diakibatkan oleh masih menurunnya kinerja Konsumsi Pemerintah dan Investasi.

Konsumsi pemerintah pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan sebesar -2,86% (yoy). Namun demikian, penurunan tersebut lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -5,62% (yoy), seiring dengan percepatan realisasi anggaran di akhir tahun dan akselerasi belanja dalam rangka proses tanggap darurat di daerah terdampak bencana. Sementara, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami kontraksi disebabkan menurunnya proyek investasi di Aceh dibandingkan tahun sebelumnya yang terdapat penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Grafik 1.3. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan IV 2025



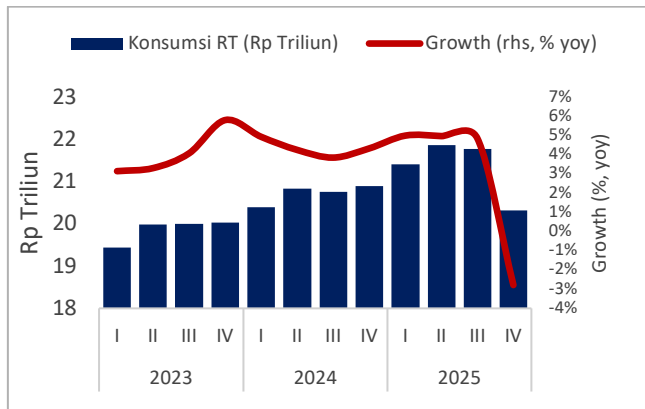
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2025, konsumsi rumah tangga tercatat terkontraksi seiring dengan terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat karena bencana hidrometeorologi. Konsumsi rumah tangga pada periode laporan terkontraksi sebesar -2,86% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (yoy) (Grafik 1.4). Terkontraksinya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh bencana hidrometeorologi yang berdampak pada mata pencarian 2.584.067 orang masyarakat yang terdampak di 18 Kabupaten/Kota. Selain dari itu, berdasarkan data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, masyarakat juga terpapar kerugian karena bencana yaitu sebanyak 225.221 unit rumah warga, 56.652 hektare (ha)

sawah, 100.376 ha lahan perkebunan, 77.931 ekor hewan ternak, dan 29.453 ha tambak.

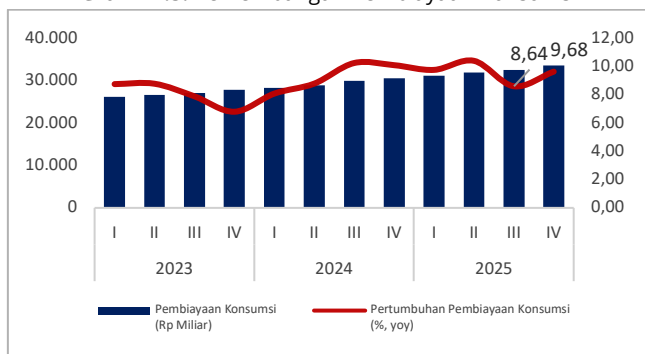
Grafik 1.4. Pertumbuhan Konsumsi RT



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju kontraksi konsumsi rumah tangga yang lebih dalam tertahan oleh membaiknya pembiayaan konsumsi. Pembiayaan konsumsi pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 9,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,64% (yoy) (Grafik 1.5). Peningkatan pembiayaan konsumsi terindikasi didorong oleh meningkatnya kebutuhan dana di masyarakat untuk pemulihan pasca bencana.

Grafik 1.5. Perkembangan Pembiayaan Konsumsi



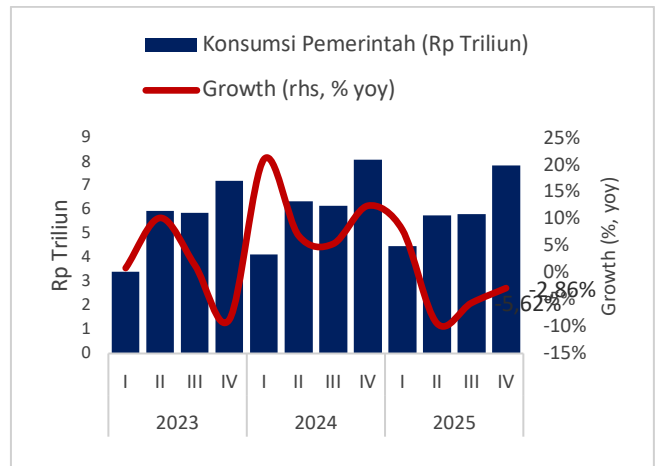
Sumber : Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV berkontraksi, namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, konsumsi pemerintah tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,86% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang berkontraksi sebesar -5,62% (yoy) (Grafik 1.6.). Membaiknya konsumsi pemerintah pada triwulan IV juga tercermin pada kinerja LU Administrasi Pemerintah yang tercatat tumbuh sebesar 2,91% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,26% (yoy) (Grafik 1.7.).

Grafik 1.6. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Menurunnya konsumsi pemerintah tercermin dari menurunnya realisasi APBD. Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan tahun 2025 mencapai Rp34,45 Triliun atau sebesar 83,89% dari total pagu anggaran. Angka realisasi tersebut menurun sebesar -15,81% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu dengan realisasi sebesar Rp40,91 Triliun. Turunnya realisasi belanja dapat dikaitkan dengan turunnya pagu anggaran secara keseluruhan dari Rp42,3 Triliun pada tahun anggaran 2024, menjadi Rp41,06 Triliun pada tahun anggaran 2025, atau turun sebesar -2,96% (yoy).

Grafik 1.7. Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan

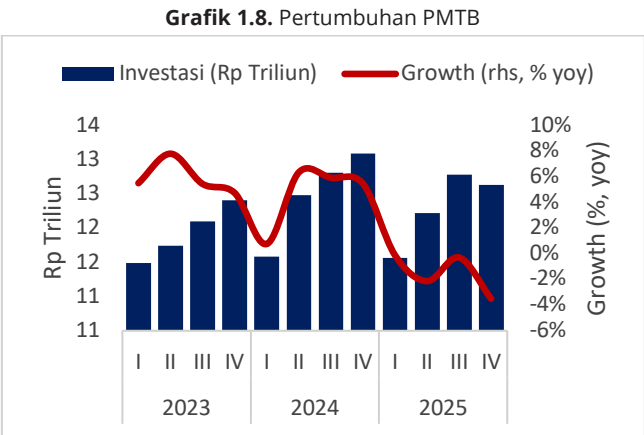


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pada triwulan IV 2025, PMTB di Provinsi Aceh tercatat mengalami penurunan, seiring

menurunnya proyek investasi. PMTB Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar -3,52% (yoy) lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -0,29% (yoy) (Grafik 1.8.). Lebih dalamnya kontraksi pertumbuhan PMTB disebabkan oleh menurunnya proyek investasi di Aceh dibandingkan triwulan IV 2024 yang terdapat penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada periode yang sama tahun sebelumnya, terdapat penyelesaian berbagai PSN yaitu Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Sigli-Banda Aceh, Bendungan Keureuto, dan Bendungan Rukoh. Kendati demikian, penurunan yang lebih dalam dapat dihindarkan dengan adanya percepatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pemerintah dalam rangka proses tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Per 31 Desember 2025, realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik se-Provinsi Aceh untuk keseluruhan tahun anggaran 2025 tercatat mencapai Rp734,42 Miliar atau 96% dari total pagu anggaran.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Menurunnya PMTB juga tercermin dari melambatnya pertumbuhan pembiayaan investasi. Secara tahunan, realisasi pertumbuhan pembiayaan investasi mengalami perlambatan dari 7,82% (yoy) pada triwulan III 2025, menjadi 4,27% (yoy) pada triwulan laporan.

Grafik 1.9. Perkembangan Pembiayaan Investasi



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Ekspor Barang dan Jasa

Kinerja ekspor barang dan jasa Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 mengalami penurunan karena terbatasnya aktivitas produksi akibat bencana hidrometeorologi serta frontloading ekspor batubara. Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar -6,09% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,50% (yoy) (Grafik 1.10). Kontraksi tersebut disebabkan oleh menurunnya ekspor batu bara karena adanya *front loading* dari India. Selain itu, terdapat gangguan produksi komoditas ekspor karena bencana seperti kopi.

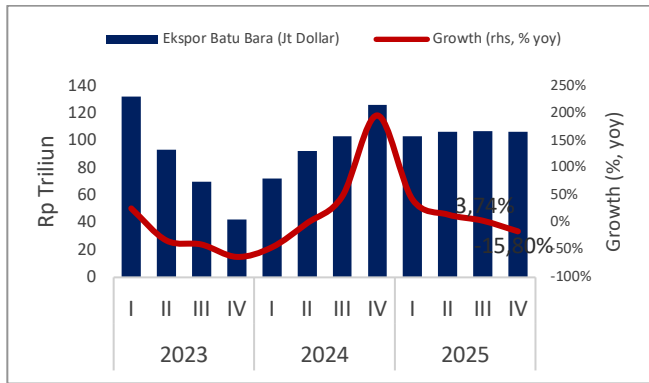


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Menurunnya kinerja ekspor batubara menjadi faktor utama berkontraksinya ekspor Aceh. Ekspor batubara merupakan sumber utama ekspor Provinsi Aceh dengan pangsa sebesar 71,07%. Sehingga penurunan ekspor batu bara pada triwulan IV 2025 yang sebesar -15,80% (yoy), berdampak signifikan terhadap kinerja Ekspor Aceh. (Grafik 1.11). Penurunan ekspor batu bara

disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari India yang memiliki pangsa sebesar 94,29% dari total ekspor batu bara. Ekspor batu bara ke India tercatat pada triwulan IV 2025 mencapai USD100,84 juta, turun dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai USD114,09 juta. Penurunan permintaan India dikarenakan oleh penurunan konsumsi listrik serta masih tingginya stok cadangan batu bara pasca kebijakan *frontloading* yang dilakukan pada semester I. Selain itu, terdapat *global oversupply* pada pasar batu bara di tahun 2025.

Grafik 1.11. Perkembangan Ekspor Batubara

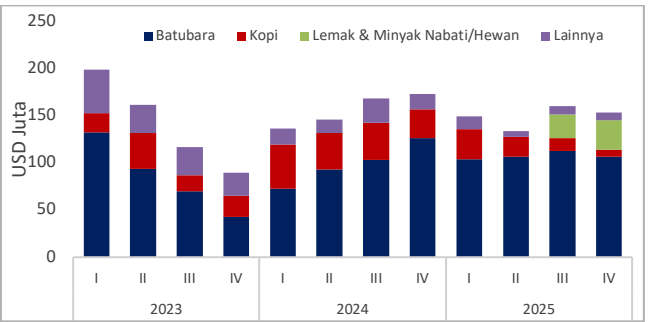


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Kinerja ekspor komoditas lainnya juga tercatat mengalami penurunan. Pada triwulan IV 2025, ekspor kopi Provinsi Aceh mencapai US\$7,53 juta, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US\$13,61 juta, atau turun sebesar -44,67% (qtq). Secara tahunan, ekspor komoditas kopi juga tercatat turun dari US\$30,50 Juta pada triwulan IV 2024 menjadi US\$7,53 Juta pada triwulan IV 2025, atau turun sebesar -75,30% (yoy). Adapun ekspor lainnya (pangsa 5,13%) umumnya terdiri dari komoditas rempah-rempah, minyak nabati, pupuk, produk kimia, bahan anyaman nabati dan produk nabati lainnya, serta ikan olahan. Pada periode laporan, ekspor lainnya memberikan nilai ekspor sebesar US\$7,85 juta, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar USD8,71 juta, atau turun sebesar -10,65% (qtq). Secara tahunan, ekspor komoditas lainnya juga tercatat turun dari US\$9,88 Juta pada triwulan IV 2024, menjadi US\$7,85 Juta pada triwulan IV 2025. Pada triwulan laporan, komoditas ekspor luar negeri Provinsi Aceh terbesar kedua setelah batu bara adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dengan pangsa sebesar 20,40% atau sebesar

USD31,25 juta. Namun demikian, ekspor CPO langsung melalui pelabuhan di Provinsi Aceh baru dilakukan sejak triwulan III 2025 sehingga belum dapat dihitung untuk pertumbuhannya (Grafik 1.12).

Grafik 1.12. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Provinsi Aceh

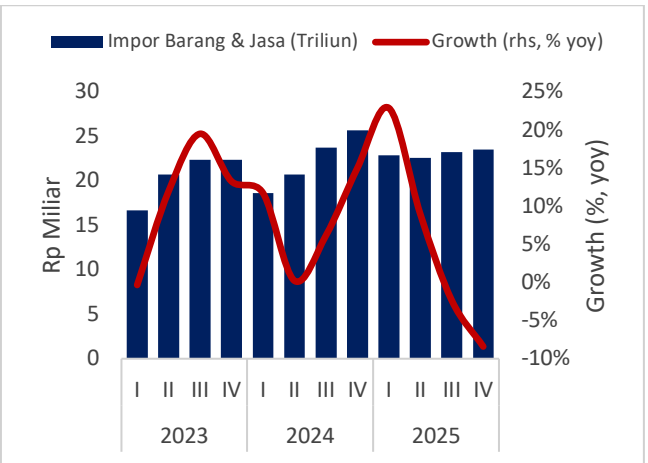


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Impor Barang dan Jasa

Kinerja impor barang dan jasa secara tahunan juga mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Pada triwulan IV 2025, impor barang dan jasa terkontraksi sebesar -8,41% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -2,36% (yoy) (Grafik 1.13).

Grafik 1.13. Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa

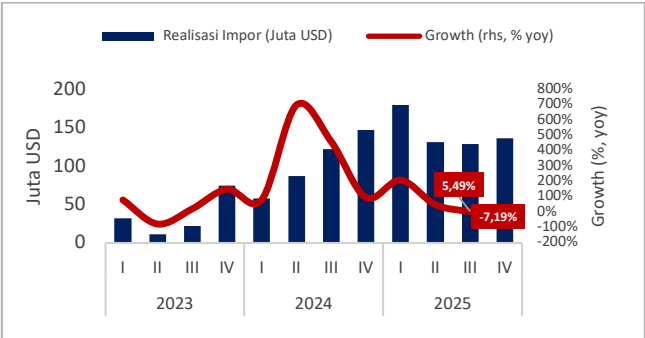


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Impor Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 yang tinggi didominasi oleh impor migas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor barang Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 sebesar US\$107,70 Juta, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar US\$95,96 juta. (Grafik 1.14). Impor Provinsi didominasi oleh impor minyak dan gas (Pangsa: 86,66% dari total impor), disusul oleh komoditas pupuk (Pangsa:

6,22%), bahan kimia anorganik (Pangsa: 4,30%), dan komoditas lainnya (Pangsa: 2,82%). Turunnya kinerja impor dapat dikaitkan dengan kontraksi pada impor Migas yang tercatat turun secara tahunan pada triwulan laporan sejumlah -17,90% (yoy), dari US\$131,18 Juta pada triwulan IV 2024 menjadi US\$107,70 pada triwulan IV 2025.

Grafik 1.14. Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri

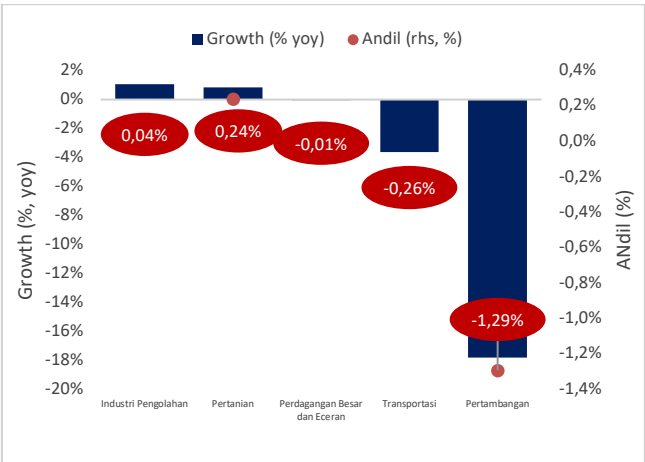


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi penawaran, terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Aceh disebabkan oleh menurunnya kinerja berbagai LU strategis yang memiliki pangsa besar terhadap perekonomian. Terkontraksinya pertumbuhan perekonomian Aceh pada triwulan laporan utamanya disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan LU Pertambangan (-17,79% (yoy)), serta LU Transportasi dan Pergudangan (-3,60% (yoy)). Sementara itu, LU strategis yang memiliki pangsa terbesar terhadap perekonomian yaitu LU Pertanian tumbuh sangat rendah yaitu sebesar 0,85% (yoy) (Grafik 1.15).

Grafik 1.15. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan IV 2025



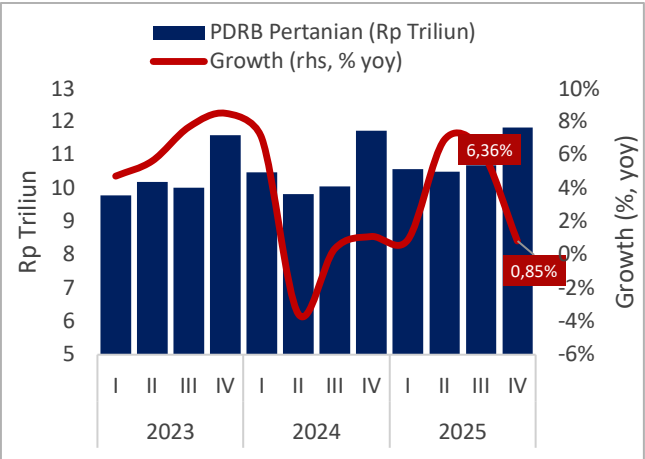
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja LU Pertanian tumbuh sangat rendah karena terdampak bencana hidrometeorologi.

LU Pertanian pada triwulan IV hanya tumbuh sebesar 0,85% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,36% (yoy) (Grafik 1.16.). Hal ini utamanya disebabkan oleh bencana hidrometeorologi yang menyebabkan kerusakan pada 100.376 ha lahan perkebunan, 56.652 ha lahan sawah, 77.931 ekor hewan ternak, dan 29.453 ha lahan tambak. Meskipun demikian, LU Pertanian masih tercatat tumbuh positif karena subsektor perkebunan tahunan masih memproduksi, khususnya di daerah yang tidak terdampak bencana.

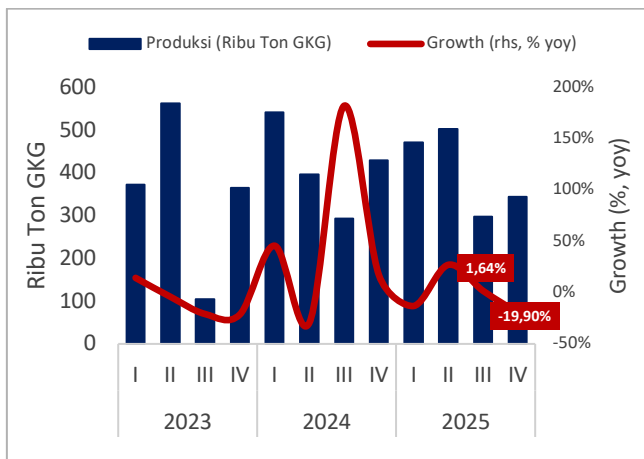
Grafik 1.16. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Rendahnya pertumbuhan LU Pertanian tercermin dari menurunnya produksi padi triwulan IV 2025. Pada triwulan laporan, produksi padi di Provinsi Aceh mencapai 343,33 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau terkontraksi sebesar -19,90% (yoy) dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 428,61 ribu ton GKG (Grafik 1.17).

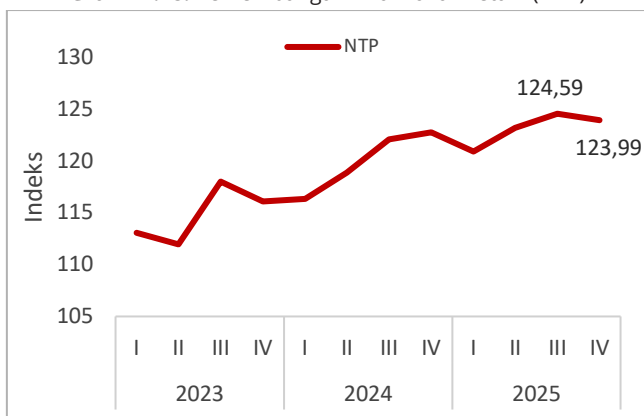
Grafik 1.17. Perkembangan Produksi Padi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

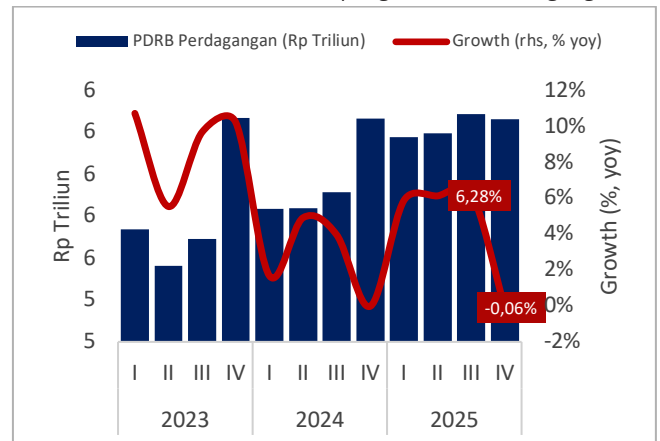
Melambatnya kinerja LU Pertanian juga tercermin pada turunnya NTP pada triwulan laporan. NTP pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 123,99 atau turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 124,59 (Grafik 1.18.). Turunnya nilai NTP disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pada Indeks Harga yang Diterima Petani (It).

Grafik 1.18. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)



kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran utamanya disebabkan oleh bencana hidrometeorologi yang menyebabkan penurunan aktivitas konsumsi RT dan terputusnya jalur logistik utama Provinsi Aceh, seperti Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, 2.507 titik jalan daerah, serta terputusnya 599 unit jembatan.

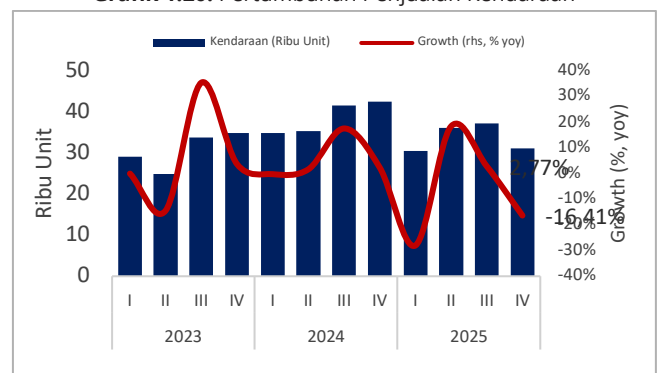
Grafik 1.19. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Terbatasnya kinerja LU Perdagangan juga tercermin pada turunnya pertumbuhan penjualan kendaraan baru pada triwulan IV 2025. Total kendaraan baru yang terjual pada triwulan laporan tercatat sejumlah 31.026 unit kendaraan, turun -26,90% (yoy). Penurunan tersebut lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -10,55% (yoy) (Grafik 1.20).

Grafik 1.20. Pertumbuhan Penjualan Kendaraan



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

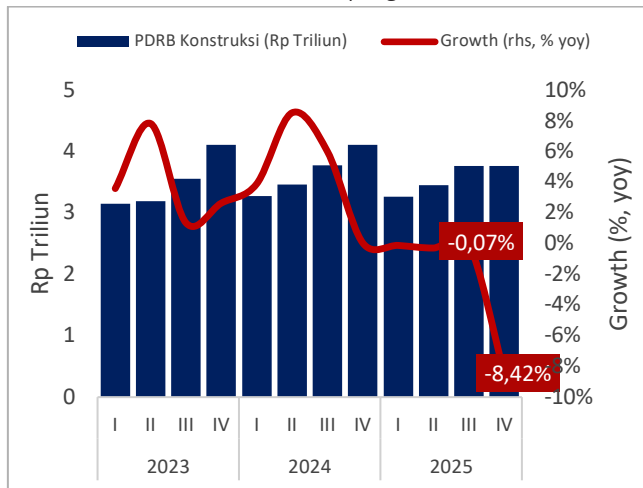
Kinerja LU Perdagangan pada triwulan IV 2025 mengalami penurunan, seiring menurunnya aktivitas konsumsi masyarakat karena bencana dan belum pulihnya jalur distribusi. Pada triwulan IV 2025, LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat terkontraksi sebesar -0,06% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,28% (yoy) (Grafik 1.19.). Terkontraksinya

Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan mengalami kontraksi, sejalan dengan turunnya kinerja investasi. Pada triwulan IV 2025, LU Konstruksi tercatat terkontraksi sebesar -8,42%

(yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -0,07% (yoy) (Grafik 1.21). Masih terkontraksinya kinerja LU Konstruksi karena masih terbatasnya proyek pembangunan besar pada triwulan laporan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang terdapat penyelesaian pembangunan PSN.

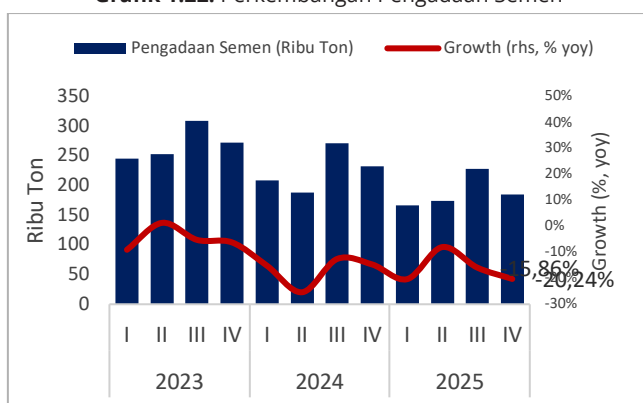
Grafik 1.21. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Terkontraksinya kinerja LU Konstruksi tercermin dari menurunnya pengadaan semen pada triwulan IV 2025. Pengadaan semen pada triwulan laporan tercatat sejumlah 185.439 ton, menurun sebesar -20,24% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang turun -15,86% (yoy).

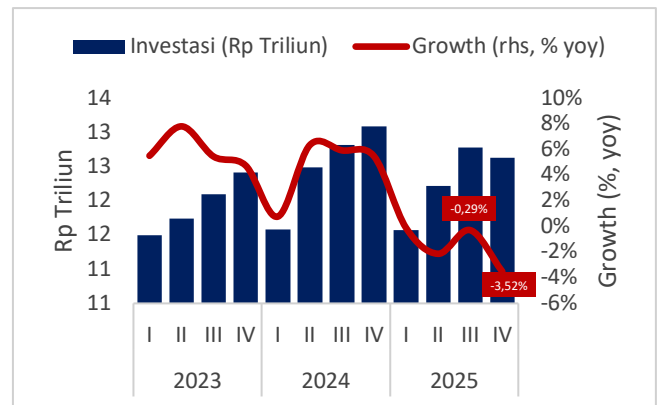
Grafik 1.22. Perkembangan Pengadaan Semen



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Terkontraksinya LU Konstruksi juga sejalan dengan menurunnya kinerja investasi di Aceh. PMTB Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar -3,52% (yoy) lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -0,29% (yoy) (Grafik 1.23.).

Grafik 1.23. Pertumbuhan PMTB

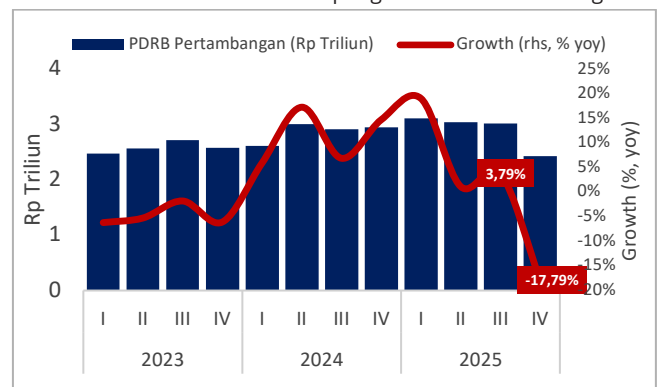


Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Lapangan Usaha Pertambangan

LU Pertambangan pada triwulan IV 2025 terkontraksi cukup dalam, bersumber dari menurunnya ekspor batu bara. Pada triwulan IV 2025, LU Pertambangan tercatat terkontraksi sebesar -17,79% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,79% (yoy) (Grafik 1.24.). Kontraksi ini disebabkan oleh menurunnya ekspor batu bara pada sebesar -15,80% (yoy) (Grafik 1.11). Selain itu, kontraksi pada LU Pertambangan juga disebabkan oleh turunnya produksi pada subsektor Minyak dan Gas.

Grafik 1.24. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekontraksinya kinerja LU Pertambangan juga tercermin dari turunnya kinerja pembiayaan sektor pertambangan. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan sektor tambang secara tahunan tercatat mengalami kontraksi sebesar -72,62% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,74% (yoy) (Grafik 1.25.).

Grafik 1.25. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan

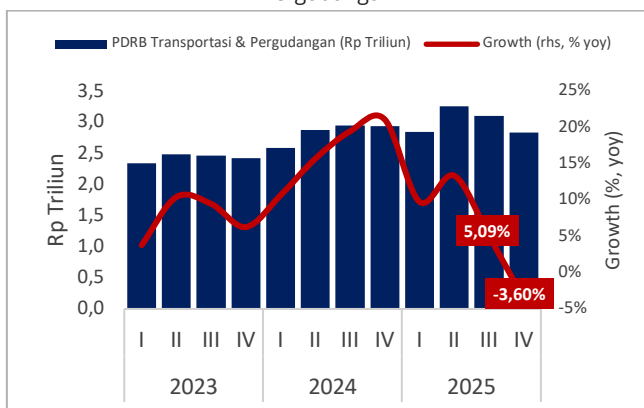


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

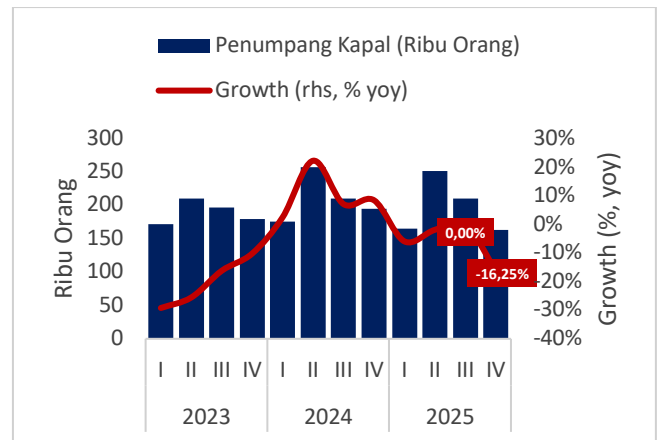
Terdampaknya jalur logistik karena bencana, berdampak pada menurunnya pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan. Pada triwulan IV 2025, LU Transportasi dan Pergudangan tercatat tumbuh sebesar -3,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,09% (yoy) (Grafik 1.26). Terkontraksinya pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan dikaitkan dengan bencana hidrometeorologi yang menyebabkan terputusnya jalur logistik utama Provinsi Aceh, seperti Jalan Nasional Banda Aceh-Medan dan pada 2507 titik jalan lainnya, serta terputusnya sejumlah 599 unit jembatan.

Grafik 1.26. Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan



sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,01% (yoy) (Grafik 1.27).

Grafik 1.27. Perkembangan Penumpang Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue

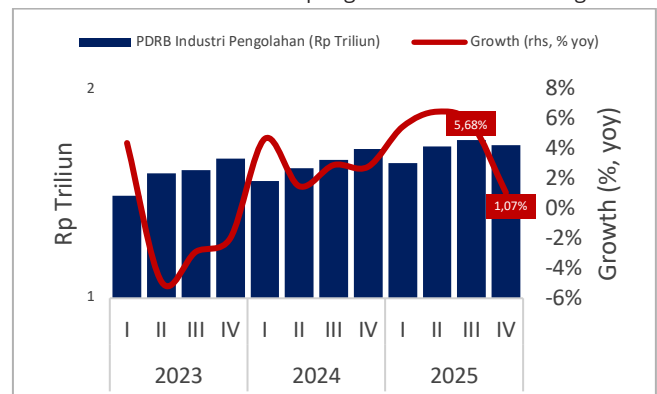


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Laju pertumbuhan LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 1,68% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,68% (yoy) (Grafik 1.28.). Perlambatan tersebut disebabkan oleh terhambatnya logistik dan distribusi barang bahan pokok dan barang antara untuk industri pengolahan, serta terhambatnya jaringan listrik dan penyaluran bahan bakar akibat dampak bencana hidrometeorologi, baik pada industri besar dan industri kecil menengah.

Grafik 1.28. Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan

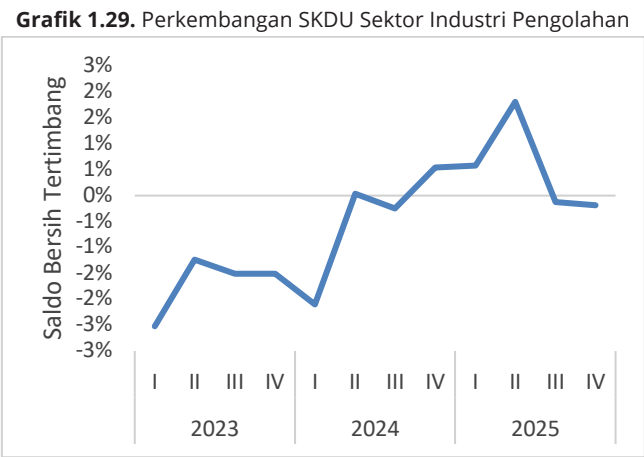


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Terkontraksinya LU Transportasi dan Pergudangan juga tercermin pada turunnya jumlah penumpang angkutan laut. Pada triwulan IV 2025, jumlah penumpang kapal (penumpang naik dan penumpang turun) di Pelabuhan Ulee Lheue, mengalami penurunan sebesar -16,25% (yoy) atau lebih dalam dibandingkan dengan triwulan

Melambatnya kinerja LU Industri Pengolahan juga tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia

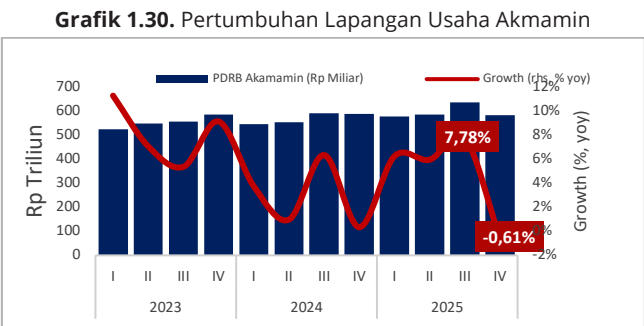
Usaha (SKDU) yang tercatat turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) SKDU LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar -0,19%, turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -0,13%, (Grafik 1.29.).



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) juga terdampak bencana hidrometeorologi. Pada triwulan IV 2025, angka pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman berkontraksi sebesar -0,61% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,78% (yoy) (Grafik 1.30.). Kontraksi tersebut disebabkan oleh terputusnya pasokan listrik serta penyaluran bahan bakar gas pada usaha penyedia akomodasi dan makan minum.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Menurunan kinerja LU Akmamin juga dipengaruhi oleh turunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara pada triwulan IV-2025

tercatat mencapai 12.725 wisatawan, atau tumbuh 33,32% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 48,47% (yoy) (Grafik 1.31.).



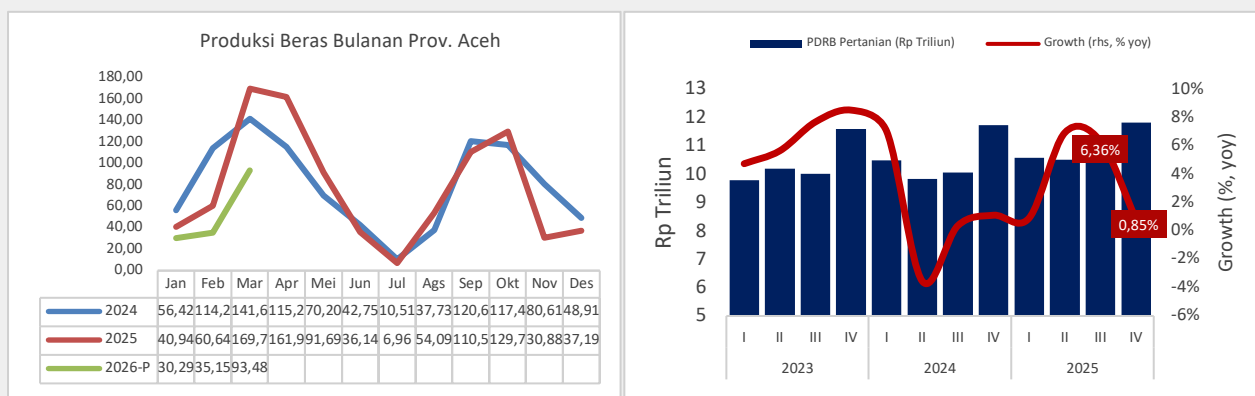
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

DAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI TERHADAP SEKTOR PERTANIAN DAN POTENSI PENINGKATAN INFLASI PANGAN BERGEJOLAK (VOLATILE FOOD)

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir November 2025, merupakan bencana terparah yang terjadi di Provinsi Aceh sejak bencana tsunami yang terjadi di tahun 2004. Bencana ini berdampak pada 18 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Selain destruksi fasilitas umum dan harta benda masyarakat, bencana ini berpotensi memiliki dampak berkelanjutan pada daya beli masyarakat Aceh, mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar pada sektor pertanian Aceh.

Dinas Pertanian Prov. Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya terdapat 56.652 ha lahan sawah, 100.376 ha lahan perkebunan, 29.453 ha lahan tambak, dan 77.931 ekor hewan ternak yang terdampak. Hal ini tentunya menurunkan kapasitas produksi sektor pertanian, tercermin pada kinerja LU Pertanian Provinsi Aceh pada triwulan IV yang tumbuh hanya sebesar 0,85% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,36% (yoy). Penurunan tingkat produksi berkelanjutan hingga 2026 tentunya berpotensi untuk mendorong tingkat inflasi.

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) oleh BPS, luas panen padi Aceh tercatat turun dari 301,20 ribu ha di tahun 2024 menjadi 283,18 ribu ha atau turun sebesar -5,98% (yoy). Penurunan luas panen tersebut, berpotensi untuk menurunkan produksi beras pada triwulan I 2026 sebesar -112,36 ribu ton atau turun sejumlah -42,42% (yoy), dibandingkan triwulan I 2025. Angka tersebut setara dengan sekitar 12% dari total produksi beras tahunan sebesar 930-950 ribu ton per tahun. Hal ini berpotensi menjadi tekanan inflasi, menimbang komoditas beras memiliki bobot perhitungan inflasi terbesar.



Grafik Produksi Beras Bulanan Prov. Aceh dan Perkembangan LU Pertanian PDRB Aceh

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada November 2025, Aceh tercatat mengalami deflasi secara bulanan -0,66% (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 3,59% (yoy). Lalu, pada Desember 2025 inflasi melonjak 3,60% (mtm) dan inflasi tahunan mencapai 6,71% (yoy). Pada Januari 2026, Aceh kembali deflasi -0,15% (mtm), dengan inflasi tahun *on-track* pada 6,69% (yoy). Dalam rilis nasional BPS, inflasi tahunan Indonesia pada Januari 2026 tercatat 3,55%, sementara inflasi tahunan tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Aceh 6,69% (yoy).

Tetap tingginya tingkat inflasi secara tahunan turut menjadi perhatian kita bersama, karena penurunan harga bulanan setelah lonjakan tidak berarti persoalan selesai. Kendati deflasi Januari sejalan dengan normalisasi pasokan setelah distribusi berangsur pulih, namun tingkat inflasi tahunan yang masih tinggi menandakan level harga sudah terlanjur naik dibanding tahun sebelumnya. Jika produksi lokal tidak cepat pulih, tekanan baru akan muncul begitu stok menipis atau gangguan distribusi terulang.

-000-



BAB II

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja fiskal pemerintah daerah di Provinsi Aceh hingga akhir triwulan IV 2025 mencatatkan penurunan secara agregat, baik pada pendapatan maupun belanja, apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp30,85 triliun atau mencapai 75,13% dari pagu yang ditetapkan. Sementara itu, dari sisi pendapatan, total realisasi Provinsi Aceh sepanjang triwulan IV 2025 sebesar Rp32,39 triliun, setara dengan 81,12% dari total pagu.

2.1. Gambaran Umum

Kinerja agregat belanja APBD dan APBN pemerintah di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 mencatatkan penurunan secara nominal apabila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang periode pelaporan, total realisasi belanja pemerintah terakumulasi sebesar Rp76,41 triliun, atau melambat -13,73% (yoy) dari realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp88,56 triliun. Sejalan dengan penurunan nominal tersebut, tingkat realisasi belanja terhadap total pagu anggaran juga menunjukkan perlambatan. Hingga akhir triwulan IV 2025, rasio penyerapan belanja pemerintah berada pada level 81,99%, lebih rendah dibandingkan pada triwulan IV 2024 yang menyentuh 94,40%. Kinerja fiskal agregat yang menurun ini merupakan implikasi langsung dari melambatnya realisasi serapan anggaran pada kedua postur keuangan daerah, baik dari sisi APBN maupun APBD di Provinsi Aceh.

Sejalan dengan perkembangan pada komponen belanja, realisasi agregat pendapatan pemerintah tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara nominal, akumulasi pendapatan pemerintah (APBD ditambah APBN) pada triwulan IV 2025 mencapai Rp38,61 triliun. Capaian ini menunjukkan penurunan sebesar -12,26% (yoy) dari realisasi triwulan IV 2024 yang tercatat senilai Rp44,01 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat realisasi pendapatan pada postur APBN. Sementara itu, dari sisi proporsi terhadap pagu anggaran, persentase realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 81,99%. Sebagai perbandingan, capaian realisasi terhadap pagu anggaran pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 94,40%.

2.2. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Postur APBD di Provinsi Aceh, yang mencakup tingkat provinsi serta kabupaten/kota, mencatatkan peningkatan alokasi pagu pada

tahun 2025. Dari sisi pengeluaran, total pagu belanja APBD ditetapkan sebesar Rp41,07 triliun, tumbuh 0,94% (yoy) dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya yang bernilai Rp40,68 triliun. Peningkatan pagu belanja ini secara umum fokus pada penyesuaian alokasi untuk komponen belanja operasi dan belanja tidak terduga. Sejalan dengan hal itu, nilai pagu pendapatan daerah juga mengalami penyesuaian. Pagu pendapatan APBD ditetapkan sebesar Rp39,92 triliun, atau naik 1,16% (yoy) dari pagu tahun sebelumnya yang sebesar Rp39,47 triliun. Peningkatan target penerimaan tersebut utamanya bersumber dari kenaikan pada komponen pendapatan asli daerah serta komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2. 1. Realisasi Belanja APBD Triwulan IV 2025

	Belanja Operasi	77,44%
	Belanja Modal	57,72%
	Belanja Tidak terduga	9,91%
	Belanja Transfer	77,53%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi belanja APBD di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp30,85 triliun, yakni 75,13% dari total pagu anggaran. Proporsi penyerapan ini berada pada level yang lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase capaian pada triwulan IV 2024, yakni sebesar 91,24%. Berdasarkan hal tersebut, kinerja penyerapan belanja APBD mencatatkan pertumbuhan sebesar -16,88% (yoy) pada periode pelaporan. Secara nominal, angka realisasi belanja APBD menunjukkan penurunan dari Rp37,12 triliun pada triwulan IV 2024 menjadi Rp30,85 triliun pada triwulan IV 2025. Hal ini sejalan dengan penurunan realisasi yang terjadi pada seluruh komponen pengeluaran daerah, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Komponen belanja operasi masih menjadi penopang utama realisasi APBD pada triwulan IV 2025. Secara proporsi, jenis belanja ini memberikan kontribusi terbesar, yakni sebesar 72,14% terhadap total realisasi belanja daerah secara keseluruhan. Pada periode laporan, penyerapan pada belanja

operasi tercatat sebesar Rp22,26 triliun, atau setara dengan 77,44% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV 2024, di mana realisasi sebesar Rp25,89 triliun dengan persentase terhadap pagu sebesar 91,18%. Sejalan dengan angka realisasi tersebut, kinerja belanja operasi pada triwulan pelaporan mencatatkan pertumbuhan sebesar -14,07% (yoy).

Realisasi belanja modal turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, realisasi belanja modal tercatat senilai Rp2,27 triliun atau turun sebesar 41,14% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2025 yaitu sebesar Rp3,86 triliun. Sejalan dengan penurunan nominal tersebut, rasio realisasi terhadap pagu anggaran turut mengalami penurunan, yakni dari 96,76% pada triwulan IV 2024 menjadi 57,72% pada triwulan laporan.

Realisasi belanja tidak terduga juga mengalami perlambatan pada periode pelaporan. Secara nominal, realisasi belanja tidak terduga menurun sebesar -22,39% (yoy), turun dari Rp34,04 miliar pada triwulan IV 2024 menjadi Rp26,42 miliar pada triwulan pelaporan. Penurunan secara nominal ini juga ditunjukkan pada persentase realisasi dari total anggaran, yang merosot tajam dari 28,95% menjadi hanya 9,91% pada triwulan IV 2025. Secara teknis, rasio penyerapan yang lebih rendah tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pagu belanja tidak terduga, yakni dari Rp117,60 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp266,57 miliar pada tahun 2025.

Sementara itu, realisasi belanja transfer juga sejalan dengan penurunan belanja daerah secara umum. Pada triwulan IV 2025, komponen belanja ini mencatatkan realisasi sebesar Rp6,29 triliun, atau setara dengan 77,53% dari total alokasi pagu. Capaian ini menandakan adanya perlambatan pertumbuhan sebesar -14,03% (yoy). Sebagai perbandingan, pada triwulan IV 2024, akumulasi belanja transfer mencapai angka Rp7,33 triliun dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif lebih tinggi, yakni sebesar 89,65%.

Tabel 2. 2. Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan IV 2025

	Pendapatan Asli Daerah	83,20%
	Pendapatan Transfer	82,83%
	Lain-Lain	21,25%

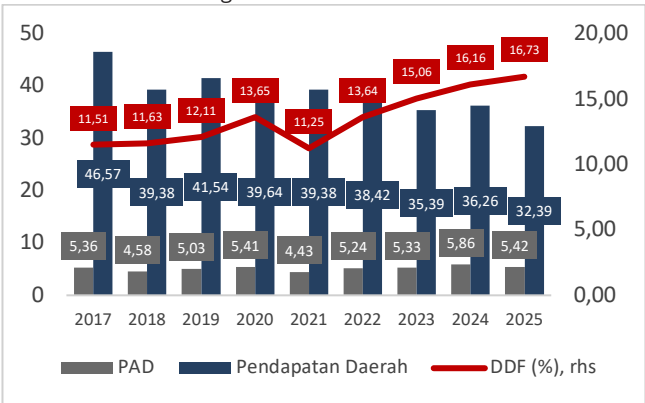
Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Secara nominal, realisasi pendapatan APBD pada triwulan IV 2025 tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hingga triwulan pelaporan, akumulasi pendapatan APBD yang terealisasi sebesar Rp32,39 triliun, setara dengan 81,12% dari total pagu tahun 2025. Sebagai perbandingan, realisasi pada triwulan IV 2024 mencatatkan angka Rp36,26 triliun dengan tingkat capaian realisasi mencapai 91,88%. Berdasarkan hal tersebut, realisasi pendapatan daerah tercatat mengalami kontraksi sebesar -10,69% (yoy).

Berdasarkan komposisi setiap komponen, pendapatan dari dana transfer menjadi kontributor terbesar dalam struktur pendapatan APBD. Pada triwulan IV 2025, komponen ini mencatatkan proporsi sebesar 82,51% terhadap total realisasi pendapatan daerah, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada periode sebelumnya yang mencapai 83,57%. Secara nominal, komponen pendapatan dari dana transfer mencatatkan realisasi sebesar Rp26,72 triliun atau mencapai 82,83% dari alokasi pagu. Angka ini menunjukkan penurunan dari realisasi pada triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar Rp30,31 triliun, setara dengan 91,84% dari pagu. Hal tersebut sejalan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dari dana transfer yang mengalami penurunan - 11,83% (yoy). Secara lebih rinci, realisasi tertinggi pada komponen pendapatan dari dana transfer ini bersumber dari dana perimbangan yang mencapai Rp17,61 triliun, kemudian dana otonomi khusus senilai Rp4,95 triliun, serta dana desa sebesar Rp4,09 triliun.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp5,42 triliun, atau setara dengan 83,20% dari target yang ditetapkan untuk tahun berjalan. Angka realisasi ini menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar Rp5,86 triliun, dengan tingkat capaian 96,90% dari pagu. Penurunan tersebut sejalan dengan tingkat pertumbuhan PAD yang berada pada angka -7,55% (yoy). Penurunan realisasi ini utamanya didorong oleh realisasi pajak daerah yang mencatatkan pertumbuhan -3,94% (yoy), yakni dari Rp2,41 triliun pada triwulan IV 2024 menjadi Rp2,31 triliun pada triwulan pelaporan.

Grafik 2. 1. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Sementara itu, proporsi PAD terhadap total realisasi pendapatan APBD pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 16,74%. Proporsi ini menunjukkan bahwa komponen pendapatan daerah secara umum masih ditopang oleh komponen pendapatan dari dana transfer. Di sisi lain, indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) memperlihatkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga triwulan IV 2025 (Grafik 2.1.). Pergerakan rasio DDF tersebut merupakan implikasi dari penyesuaian pada total pendapatan daerah yang sejalan dengan realisasi nominal PAD yang relatif stagnan pada periode yang sama.

2.3. Kinerja Anggaran dan Belanja dan Pendapatan Negara

Realisasi APBN di wilayah Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 mencatatkan angka yang lebih rendah, baik dari sisi pengeluaran maupun

penerimaan, apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja APBN pada periode pelaporan tercatat sebesar Rp45,56 triliun, atau setara dengan 95,33% dari pagu anggaran. Capaian tersebut turun sebesar -11,44% (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan IV 2024 yang mencatatkan angka Rp51,44 triliun, setara dengan 98,95% dari total pagu. Sementara itu, pada sisi penerimaan, total akumulasi pendapatan APBN mencatatkan realisasi sebesar Rp6,22 triliun, atau mencapai 86,88% dari total alokasi pagu. Angka nominal ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan IV 2024, di mana penerimaan APBN pada saat itu terealisasi sebesar Rp7,75 triliun dengan persentase pencapaian sebesar 108,34% dari pagu anggaran.

Tabel 2. 3. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh pada Triwulan IV 2025

	Belanja Pemerintah Pusat	91,20%
	Transfer ke Daerah	97,56%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada triwulan IV 2025 mencatatkan angka sebesar Rp15,33 triliun, menurun sebesar -21,21% (yoy) apabila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp19,45 triliun. Dari sisi proporsi penyerapan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 91,20% terhadap pagu anggaran, mengalami penurunan dari realisasi sebesar 98,49% pada triwulan IV 2024. Secara nominal, penurunan ini utamanya dipengaruhi oleh realisasi pada komponen belanja barang dan belanja modal. Realisasi belanja barang berada pada angka Rp4,42 triliun, atau mencatatkan pertumbuhan -41,23% (yoy) dari Rp7,53 triliun pada triwulan IV 2024. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp1,92 triliun atau turun sebesar -50,88% (yoy) dibandingkan capaian Rp3,91 triliun pada periode sebelumnya. Perkembangan pada kedua komponen pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh dinamika realokasi anggaran serta basis efek (*base effect*) penyelenggaraan pemilihan

umum pada tahun lalu. Di sisi lain, belanja pegawai tetap menjadi komponen dengan proporsi terbesar, yakni mencapai 58,18% dari total belanja pemerintah pusat. Realisasi belanja pegawai pada triwulan pelaporan tercatat sebesar Rp8,92 triliun, meningkat 12,13% (yoy) dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,95 triliun. Selain itu, komponen belanja bantuan sosial juga mencatatkan peningkatan sebesar 6,70% (yoy), dengan realisasi dari Rp60,76 miliar pada triwulan IV 2024 menjadi Rp64,83 miliar pada triwulan IV 2025.

Pada komponen belanja transfer ke daerah, realisasi pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp30,23 triliun, menurun sebesar -5,50% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp31,99 triliun. Berdasarkan proporsi terhadap pagu tahun 2025, penyerapan belanja transfer berada di angka 97,56%, menunjukkan penurunan dari tingkat realisasi sebesar 99,23% pada tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan rincian komponennya, setiap pos memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Realisasi dana bagi hasil sebesar Rp1,13 triliun atau tumbuh -1,27% (yoy), sementara dana alokasi umum mencatatkan angka sebesar Rp15,52 triliun dengan pertumbuhan -1,82% (yoy). Selanjutnya, pencatatan pada dana alokasi khusus dan dana desa masing-masing berada pada level Rp4,93 triliun atau mengalami penurunan sebesar -11,69% (yoy) dan Rp4,28 triliun atau mengalami penurunan sebesar -13,54% yoy. Dana insentif fiskal juga mengalami penurunan menjadi Rp57,66 miliar, atau turun sebesar -74,19% (yoy). Di tengah penurunan tersebut, komponen dana otonomi khusus mencatatkan arah yang berbeda dengan realisasi mencapai Rp4,31 triliun, atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,76% (yoy) pada periode pelaporan.

Triwulan IV 2025



Pajak	78,00%
PNBP	158,40%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Kinerja pendapatan APBN, yang bersumber dari komponen penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada triwulan IV 2025 mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp6,22 triliun. Penurunan tersebut tercatat sebesar -19,63% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh komponen penerimaan pajak, dengan realisasi sebesar Rp4,41 triliun atau tercatat turun sebesar -27,54% (yoy). Secara teknis, penerimaan pajak tersebut didorong oleh adanya peningkatan volume restitusi (pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak) serta penyesuaian pada komponen Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Di sisi lain, komponen kepabeanan dan cukai mencatatkan angka realisasi hingga Rp561,65 miliar, yang setara dengan 119,57% dari pagu anggaran tahun 2025. Realisasi yang positif, ditandai dengan angka yang melebihi pagu ini ditopang oleh realisasi pada komponen Bea Masuk yang tumbuh 20,82% (yoy), Bea Keluar sebesar 1.120,24% (yoy), serta Cukai pada tingkat 5,13% (yoy). Sementara itu, komponen PNBP tercatat turun sebesar -1,99% (yoy), dengan penurunan dari Rp1,28 triliun pada triwulan IV 2024 menjadi Rp1,25 triliun pada triwulan IV 2025.

Tabel 2. 4. Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh pada

Tabel 2. 6. Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan IV 2025

APBD Provinsi Aceh	Target (Pagu) APBD 2024 (miliar rupiah)	Realisasi s.d. 31 Des 2024 (miliar rupiah)	Realisasi 2024 (%)	Target (Pagu) APBD 2025 (miliar rupiah)	Realisasi s.d. 31 Des 2025 (miliar rupiah)	Realisasi 2025 (%)	Pertumbuhan 2025 (%)
A. PENDAPATAN DAERAH	39,467.74	36,261.22	91.88%	39,923.78	32,385.77	81.12%	-10.69%
I. Pendapatan Asli Daerah	6,051.32	5,863.47	96.90%	6,514.85	5,420.61	83.20%	-7.55%
1. Pajak Daerah	2,511.35	2,406.64	95.83%	2,729.18	2,311.91	84.71%	-3.94%
2. Retribusi Daerah	279.73	1,052.55	376.27%	1,312.31	1,117.06	85.12%	6.13%
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	378.39	352.31	93.11%	371.54	364.38	98.07%	3.43%
4. Lain-lain PAD yang Sah	2,881.85	2,051.97	71.20%	2,101.82	1,627.26	77.42%	-20.70%
II. Pendapatan dari Dana Transfer	32,999.30	30,305.05	91.84%	32,261.34	26,721.30	82.83%	-11.83%
III. Lain-lain Pendapatan Daerah	417.12	92.70	22.22%	1,147.59	243.86	21.25%	163.06%
B. BELANJA DAERAH	40,681.48	37,116.83	91.24%	41,065.07	30,850.88	75.13%	-16.88%
I. Belanja Operasi	28,404.58	25,898.56	91.18%	28,740.19	22,255.39	77.44%	-14.07%
II. Belanja Modal	3,987.30	3,858.26	96.76%	3,934.58	2,270.86	57.72%	-41.14%
III. Belanja Tidak Terduga	117.60	34.04	28.95%	266.57	26.42	9.91%	-22.39%
IV. Belanja Transfer	8,172.00	7,325.97	89.65%	8,123.73	6,298.21	77.53%	-14.03%
C. SURPLUS/DEFISIT	-1,213.74	-855.61	70.49%	-1,141.29	1,534.89	-134.49%	-279.39%
D. PEMBIAYAAN DAERAH	1,213.74	1,829.66	150.75%	1,141.27	1,751.97	153.51%	-4.25%
I. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1,289.14	1,949.68	151.24%	1,265.42	1,879.26	148.51%	-3.61%
II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	75.40	120.02	159.18%	124.15	127.29	102.53%	6.06%
E. SILPA	0.00	974.05	-	-0.02	3,286.86	-	237.44%

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional Januari 2026

Tabel 2. 7. Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan IV 2025

APBN di Provinsi Aceh	Target (Pagu) APBN 2024 (miliar rupiah)	Realisasi s.d. 31 Des 2024 (miliar rupiah)	Realisasi 2024 (%)	Target (Pagu) APBN 2025 (miliar rupiah)	Realisasi s.d. 31 Des 2025 (miliar rupiah)	Realisasi 2025 (%)	Pertumbuhan 2025 (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	7,149.07	7,745.40	108.34%	7,164.98	6,224.64	86.88%	-19.63%
I. Penerimaan Perpajakan	6,405.72	6,466.92	100.96%	6,373.88	4,971.54	78.00%	-23.12%
1. Penerimaan Pajak	6,035.11	6,086.00	100.84%	5,904.14	4,409.89	74.69%	-27.54%
2. Kepabeanan dan Cukai	370.61	380.92	102.78%	469.74	561.65	119.57%	47.45%
II. PNBP	743.35	1,278.48	171.99%	791.10	1,253.10	158.40%	-1.99%
B. BELANJA NEGARA	51,985.97	51,440.53	98.95%	47,790.45	45,556.67	95.33%	-11.44%
I. Belanja Pemerintah Pusat	19,752.03	19,453.77	98.49%	16,807.31	15,328.58	91.20%	-21.21%
Belanja Pegawai	7,868.19	7,953.56	101.09%	9,176.04	8,917.96	97.19%	12.13%
Belanja Barang	8,016.83	7,527.28	93.89%	5,165.65	4,424.04	85.64%	-41.23%
Belanja Modal	3,806.08	3,912.17	102.79%	2,400.46	1,921.75	80.06%	-50.88%
Belanja Bantuan Sosial	60.93	60.76	99.72%	65.16	64.83	99.49%	6.70%
II. Transfer ke Daerah	32,233.94	31,986.76	99.23%	30,983.14	30,228.09	97.56%	-5.50%
1. Dana Bagi Hasil	1,143.35	1,140.72	99.77%	1,138.23	1,126.22	98.94%	-1.27%
2. Dana Alokasi Umum	15,901.78	15,807.86	99.41%	15,736.96	15,520.83	98.63%	-1.82%
3. Dana Transfer Khusus	5,723.80	5,581.92	97.52%	5,002.54	4,929.20	98.53%	-11.69%
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	2,114.83	2,046.90	96.79%	765.05	735.28	96.11%	-64.08%
b. Dana Alokasi Khusus NonFisik	3,608.96	3,535.02	97.95%	4,237.49	4,193.92	98.97%	18.64%
4. Dana Otonomi Khusus	4,276.99	4,276.99	100.00%	4,309.58	4,309.58	100.00%	0.76%
5. Dana Desa	4,958.90	4,955.85	99.94%	4,738.17	4,284.60	90.43%	-13.54%
6. Dana Insentif Fiskal	229.12	223.41	97.51%	57.66	57.66	100.00%	-74.19%
C. SURPLUS/DEFISIT	-44,836.90	-43,695.13	97.45%	-40,625.47	-39,332.03	96.82%	-9.99%

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional Januari 2026



BAB III

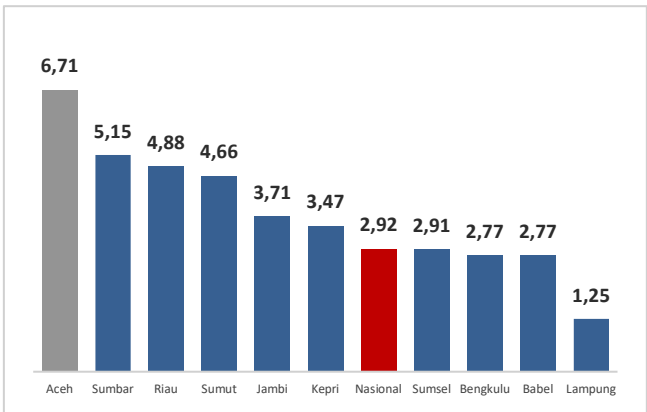
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Tingkat inflasi Provinsi Aceh berada di level 6,71% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dari posisi triwulan sebelumnya yang terealisasi sebesar 4,45% (yoy). Inflasi terutama didorong oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau disebabkan oleh bencana hidrometeorologi yang mengganggu produksi pertanian dan terhambatnya jalur distribusi.

3.1. Perkembangan Umum Inflasi

Pada triwulan IV 2025, inflasi Provinsi Aceh tercatat sebesar 6,71% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 4,45% (yoy). Capaian inflasi Aceh pada triwulan IV 2025 berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92% (yoy) (Grafik 3.1). Sebagai langkah responsif atas pergerakan harga tersebut, upaya pengendalian di tingkat daerah terus dilakukan melalui penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Pengendalian inflasi ini diimplementasikan dengan mengacu pada strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, serta mengelola ekspektasi masyarakat melalui komunikasi yang efektif.

Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan IV 2025 (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Inflasi triwulan IV tahun 2025 paling besar dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil tertinggi sebesar 4,62%. Dorongan inflasi selanjutnya berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,91%, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,43%, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,33%. Sementara itu, laju inflasi secara umum ditahan oleh kelompok pendidikan

yang mengalami deflasi sebesar 0,01%. Jika dilihat dari andil setiap komoditas, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan laporan meliputi cabai merah, emas perhiasan, beras, ikan tongkol, dan ikan dencis. Sebaliknya, komoditas yang menahan laju inflasi dengan andil deflasi tertinggi adalah tomat, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, detergen cair, dan bawang putih.

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Kelompok Barang dan Jasa	Tw III 2025		Tw IV 2025	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	9,05	3,30	12,47	4,62
Pakaian dan Alas Kaki	2,81	0,17	1,59	0,09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,67	0,11	2,04	0,33
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0,24	-0,01	0,46	0,02
Kesehatan	2,58	0,05	3,92	0,07
Transportasi	0,70	0,07	2,28	0,23
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,08	0,00	0,04	-0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,89	0,02	1,29	0,02
Pendidikan	-0,16	-0,01	-0,16	-0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,45	0,16	4,03	0,43
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	10,57	0,59	16,02	0,91
Inflasi Umum	4,45		6,71	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Tabel 3.2. Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

INFLASI 12,47% (yoy)		ANDIL 4,62%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Beras	1,06	Tomat	-0,16
Cabai merah	0,38	Bawang putih	-0,01
Ikan tongkol / Ikan ambu-ambu	0,35	Mangga	-0,01
Ikan dencis	0,31	Kunyit	-0,01
Telur ayam ras	0,30	Susu bubuk untuk balita	-0,01
Minyak goreng	0,26	Susu bubuk	-0,01
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,25	Daun singkong	-0,01

Ikan bandeng / Ikan bolu	0,21		
Bawang merah	0,15		
Daging ayam ras	0,14		
Ikan tuna	0,1		
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	0,1		
Ikan kembung / Ikan gembung	0,1		
Wortel	0,09		
Ikan cakalang / Ikan sisik	0,07		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan peningkatan tekanan inflasi pada triwulan laporan. Secara tahunan, inflasi kelompok ini meningkat dari 9,05% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 12,47% (yoy) pada triwulan IV 2025 (Tabel 3.2). Pendorong utama kenaikan ini adalah subkelompok makanan yang mencatatkan inflasi sebesar 14,31% (yoy).

Jika dilihat berdasarkan komoditas, andil inflasi terbesar bersumber dari beras, cabai merah, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu. Kenaikan harga beras dan cabai merah disebabkan oleh terganggunya jalur distribusi serta terbatasnya hasil produksi akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Kondisi cuaca buruk tersebut menyulitkan nelayan untuk melaut, sehingga pasokan ikan tongkol belum dapat memenuhi permintaan di pasar. Selain faktor cuaca, ketiga komoditas tersebut juga mengalami pergeseran musim panen yang berdampak pada stabilitas pasokan.

Inflasi lebih lanjut didorong oleh komoditas telur ayam ras dengan andil 0,30%, minyak goreng sebesar 0,26%, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan andil inflasi sebesar 0,25%. Kenaikan harga SKM merupakan dampak dari penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) yang mengacu pada PMK Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 192/2021 terkait Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kenaikan tarif cukai yang berlaku ini mendorong peningkatan harga pada produk rokok dan tembakau. Di sektor

perikanan, komoditas ikan bandeng, ikan tuna, dan ikan kembung juga turut menyumbang inflasi dengan andil masing-masing sebesar 0,21%, 0,10%, dan 0,10%.

Namun demikian, laju inflasi kelompok ini sedikit tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas pangan. Tomat mencatatkan andil deflasi sebesar 0,16%, diikuti oleh bawang putih, mangga, kunyit, susu bubuk, dan daun singkong dengan andil masing-masing sebesar 0,01%. Penurunan harga ini disebabkan oleh terjaganya ketersediaan pasokan dari berbagai daerah sentra produksi selama periode laporan.

Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Tabel 3.3. Inflasi Kel. Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI 1,59% (yoy)		ANDIL 0,09%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Seragam Sekolah Anak	0,02	Baju Muslim Wanita	-0,01
Blus Wanita	0,02		
Ongkos Jahit	0,01		
Celana Panjang Jeans Pria	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju inflasi kelompok pakaian dan alas kaki tercatat menurun pada triwulan IV 2025. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,59% (yoy) dengan andil 0,09%, angka yang lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,81% (yoy). Jika dilihat lebih rinci, inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok pakaian sebesar 1,65% (yoy) dan subkelompok alas kaki sebesar 1,29% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, seragam sekolah anak dan blus wanita menjadi kontributor terbesar dengan andil masing-masing sebesar 0,02%. Komoditas lain seperti ongkos jahit, celana panjang jeans pria, kaos tanpa kerah (*t-shirt*), sarung, jaket pria, serta seragam sekolah pria turut memberikan kontribusi dengan andil masing-masing sebesar 0,01%. Berdasarkan data pada triwulan IV 2025, kelompok ini tidak memberikan andil atau kontribusi yang signifikan terhadap andil inflasi secara *month-to-month* (m-to-m).

Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Tabel 3.4. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI 2,04% (yoy)		ANDIL 0,33%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bahan Bakar Rumah	0,27	Besi Beton	-0,01
Kontrak Rumah	0,04	Semen	-0,01
Tukang Bukan Mandor	0,02		
Batu Bata/Batu Tela, dan Sewa Rumah	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga meningkat pada periode laporan. Pada triwulan IV 2025, kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 2,04% (yoy). Kontributor terbesar berasal dari subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami kenaikan sebesar 3,96% (yoy). Secara spesifik, bahan bakar rumah tangga menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi dengan andil sebesar 0,27%. Selain itu, kenaikan biaya kontrak rumah juga memberikan kontribusi terhadap inflasi kelompok ini dengan andil sebesar 0,04%.

Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Tabel 3.5. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 0,46% (yoy)		ANDIL 0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sabun Cair/Cuci Piring	0,01	Detergen Cair	-0,01
Sprey	0,01	Sabun Detergen Bubuk	-0,01
Upah Asisten Rumah Tangga	0,01	Pengharum Cucian/Pelembut	-0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2025, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga mengalami inflasi. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 0,46% (yoy). Tekanan inflasi bersumber dari subkelompok tekstil rumah tangga dengan inflasi sebesar 4,21% (yoy). Sedangkan subkelompok yang mengalami deflasi adalah barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah

tangga rutin sebesar 0,21% (yoy). Komoditas yang memberikan andil deflasi tertinggi adalah detergen cair, sabun detergen bubuk, dan pengharum cucian/pelembut dengan andil inflasi sebesar 0,01%.

Kel. Kesehatan

Tabel 3.6. Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 3,92% (yoy)		ANDIL 0,07%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Vitamin	0,02	Tidak Dipublikasi	
Obat dengan Resep	0,01	Tidak Dipublikasi	
Tarif Check Up	0,01	Tidak Dipublikasi	
Obat Penurun Panas	0,01	Tidak Dipublikasi	
Obat Gosok	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan inflasi kelompok kesehatan pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Secara tahunan, kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 3,92% (yoy) dengan andil sebesar 0,07%, lebih tinggi dari capaian triwulan III 2025 yang sebesar 2,58% (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh subkelompok jasa kesehatan lainnya yang mengalami inflasi sebesar 11,24% (yoy). Sebaliknya, subkelompok jasa rawat jalan mencatatkan tekanan inflasi terendah dengan inflasi sebesar 1,30% (yoy). Jika dilihat dari komoditasnya, vitamin memberikan andil inflasi terbesar sebesar 0,02%. Komoditas lain yang turut memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,01% yaitu obat dengan resep, obat gosok, obat penurun panas, serta tarif check-up.

Kel. Transportasi

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI 2,28% (yoy)		ANDIL 0,23%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Mobil	0,09	Tidak Dipublikasi	
Angkutan Udara	0,05	Tidak Dipublikasi	
Bensin	0,03	Tidak Dipublikasi	
Service	0,02	Tidak Dipublikasi	
Sepeda Motor	0,02	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok transportasi mencatatkan kenaikan tekanan inflasi dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, inflasi kelompok ini berada pada level 2,28% (yoy) dengan andil 0,23%, meningkat dari realisasi triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 0,70% (yoy). Peningkatan ini utamanya didorong oleh subkelompok jasa angkutan penumpang yang mengalami kenaikan hingga 6,88% (yoy). Dari sisi komoditas, mobil memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,09%, diikuti angkutan udara sebesar 0,05%, bensin 0,03%, serta pemeliharaan/service dan sepeda motor yang masing-masing menyumbang 0,02%. Kenaikan harga kendaraan bermotor tersebut merupakan dampak dari penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, khususnya pada unit yang sebelumnya telah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Faktor pendorong lainnya adalah kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi (Pertamax dan Dexlite) per 1 Desember 2025, yang merujuk pada Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 terkait formula harga dasar BBM di SPBU. Di samping itu, memasuki masa libur akhir tahun, tarif transportasi mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat. Meskipun demikian, tekanan harga sedikit tertahan akibat adanya kebijakan diskon angkutan udara yang telah diimplementasikan pemerintah pada periode sebelumnya.

Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI 0,04% (yoy)		ANDIL ~0%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tidak Dipublikasi		Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju inflasi kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat sedikit menurun pada triwulan IV 2025. Kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 0,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai 0,08% (yoy). Dengan angka tersebut, andil kelompok ini terhadap inflasi maupun deflasi secara

keseluruhan dinilai tidak signifikan. Jika dilihat dari sisi subkelompok, subkelompok peralatan informasi dan komunikasi mengalami inflasi sebesar 0,16% (yoy). Namun disisi lain, subkelompok layanan informasi dan komunikasi maupun subkelompok jasa keuangan menunjukkan pergerakan harga yang stabil tanpa perubahan signifikan.

Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 1,29% (yoy)		ANDIL 0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Buku Tulis Bergaris	0,01	Mainan Anak	-0,02
Rekreasi	0,01		
Tas Sekolah	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan inflasi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menunjukkan pergerakan melambat pada triwulan IV 2025. Kelompok ini mencatatkan inflasi tahunan sebesar 1,29% (yoy) dengan andil 0,02%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 1,89% (yoy). Secara rinci, inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok layanan rekreasi dan olahraga yang tumbuh sebesar 6,63% (yoy). Di sisi lain, subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga mengalami deflasi sebesar 2,66% (yoy). Tingkat deflasi subkelompok ini sedikit membaik dibandingkan triwulan III 2025 yang sempat menyentuh 2,77% (yoy). Jika dilihat dari sisi komoditas, andil terbesar inflasi tahunan adalah buku tulis bergaris, biaya rekreasi, dan tas sekolah dengan andil masing-masing sebesar 0,01%. Sementara itu, komoditas yang menjadi penahan laju inflasi adalah mainan anak dengan andil deflasi sebesar 0,02%.

Kel. Pendidikan

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI -0,16% (yoy)		ANDIL -0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sekolah Dasar	0,03	Sekolah Menengah Atas	-0,03
Taman Kanak-kanak	0,02	Sekolah Menengah Pertama	-0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju deflasi pada kelompok pendidikan terus berlanjut hingga periode laporan. Pada triwulan IV 2025, kelompok ini mencatatkan deflasi sebesar 0,16% (yoy) dengan andil -0,01%, angka yang sama dengan realisasi pada triwulan sebelumnya. Penurunan harga pada kelompok ini dipengaruhi oleh subkelompok pendidikan menengah yang mengalami deflasi sebesar 6,19% (yoy). Secara spesifik, biaya sekolah menengah atas menjadi pendorong utama deflasi dengan andil 0,03%, disusul oleh biaya sekolah menengah pertama dengan andil sebesar 0,02%. Di sisi lain, subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini masih menunjukkan tekanan inflasi sebesar 4,36% (yoy). Komoditas yang memberikan andil inflasi tahunan adalah biaya sekolah dasar sebesar 0,03% dan biaya taman kanak-kanak sebesar 0,02%.

Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 4,03% (yoy)		ANDIL 0,43%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Nasi Dengan Lauk	0,20	Tidak Dipublikasi	
Sayur Olahan	0,04	Tidak Dipublikasi	
Ketupat/Lontong Sayur	0,02	Tidak Dipublikasi	
Mie	0,02		
Kue Kering Berminyak	0,02		
Ayam Goreng	0,02		
Bakso Siap Santap	0,02		
Sate	0,01		
Siomay	0,01		
Martabak	0,01		
Bubur	0,01		
Ikan Bakar	0,01		
Gulai	0,01		
Es	0,01		
Kebab	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju inflasi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mencatatkan kenaikan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 4,03% (yoy) dengan andil

0,43%. Angka ini berbanding terbalik dengan realisasi pada triwulan III 2025 yang mencatatkan deflasi sebesar 0,16% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi tersebut berasal dari subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang meningkat sebesar 4,03% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, nasi dengan lauk menjadi penyumbang andil terbesar yakni 0,20%, disusul oleh sayur olahan sebesar 0,04%. Kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama pada subkelompok makanan akibat bencana hidroemeteorologi yang menyebabkan terganggunya pasokan berdampak langsung terhadap pergerakan harga komoditas nasi dengan lauk. Sejumlah komoditas pangan siap saji lainnya juga mendorong inflasi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, di antaranya ketupat/lontong sayur, mie, kue kering berminyak, ayam goreng, dan bakso siap santap dengan andil masing-masing sebesar 0,02%.

Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

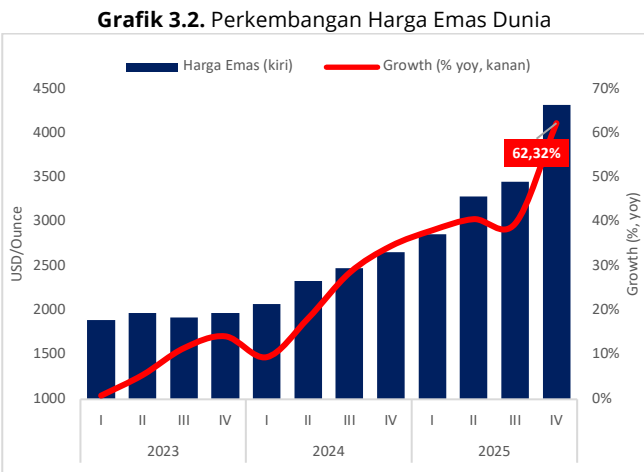
INFLASI 16,02% (yoy)		ANDIL 0,91%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Emas Perhiasan	0,79	Tidak Dipublikasi	
Pasta Gigi	0,03		
Sabun Mandi	0,02		
Shampo	0,02		
Facial/Peeling	0,01		
Deodorant	0,01		
Hand Body Lotion	0,01		
Minyak Rambut	0,01		
Tarif Gunting Rambut Pria	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan kenaikan inflasi yang signifikan pada triwulan IV tahun 2025. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 16,02% (yoy) dengan andil 0,91%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 10,57% (yoy). Jika dilihat dari subkelompok, peningkatan inflasi tahunan didorong oleh subkelompok perawatan pribadi lainnya yang meningkat tajam sebesar 36,65% (yoy). Di sisi lain, subkelompok jasa lainnya

tercatat relatif lebih stabil. Berdasarkan komoditas, emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil terbesar yakni 0,79%. Komoditas lainnya juga turut memberikan tekanan inflasi, antara lain pasta gigi dengan andil 0,03%, serta sabun mandi dan sampo yang masing-masing berkontribusi sebesar 0,02%.

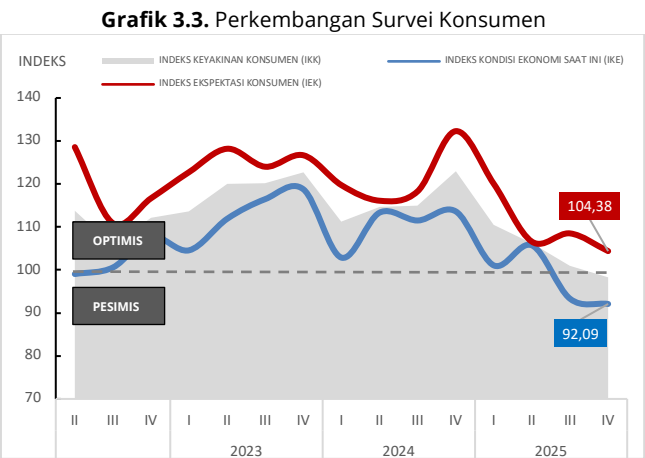
Komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang utama di balik tekanan inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kenaikan harga instrumen ini dipengaruhi oleh peningkatan harga emas global yang didorong oleh eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah, sehingga mendorong investor untuk mengalihkan aset mereka ke aset aman (*safe haven*). Selain faktor geopolitik, penguatan harga emas juga dipengaruhi oleh ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang diproyeksikan akan menurunkan suku bunga acuan. Kondisi ini diperkuat oleh langkah strategis sejumlah bank sentral dunia yang meningkatkan akumulasi cadangan emas untuk memperkuat cadangan devisa di tengah ketidakpastian ekonomi global. Secara kuantitatif, harga emas dunia pada triwulan IV 2025 menyentuh level USD4.319/ounce. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 62,32% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Grafik 3.3).



Sumber: Bloomberg, diolah

Laju inflasi pada triwulan IV 2025 tetap terkendali, didukung oleh keyakinan dan ekspektasi masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia, di mana Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) berada di atas

ambang batas optimisme (100). Secara spesifik, IEK pada triwulan laporan tercatat sebesar 104,38, meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 98,23. Angka ini sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya dan berada di bawah level optimis (100). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga mengalami penurunan menjadi 92,09. Posisi IKE yang berada di bawah level 100 mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini cenderung lebih kontraktif dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 3.4).



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

3.3. Tracking Inflasi Triwulan I 2026

Memasuki awal tahun 2026, realisasi inflasi tahunan Provinsi Aceh tercatat berada di atas rentang sasaran nasional, yang disebabkan oleh proses normalisasi harga komoditas strategis pasca bencana hidrometeorologi yang masih berlangsung. Pada Januari 2026, Aceh mengalami deflasi sebesar -0,15% (mtm), namun secara tahunan inflasi masih cukup tinggi yakni sebesar 6,69% (yoy). Deflasi secara bulanan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan harga akibat bencana pada akhir 2025 mulai menurun. Hal ini didukung oleh pemulihan jalur distribusi logistik melalui pembangunan infrastruktur darurat yang dapat memitigasi hambatan pasokan. Normalisasi harga juga diperkuat dengan masuknya masa panen raya pada sejumlah komoditas pangan utama, serta intervensi Pemerintah Pusat melalui

penyaluran bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam menjaga stabilitas pasokan. Namun, jika dilihat secara tahunan, komoditas beras dan tarif listrik menjadi kontributor utama inflasi. Tekanan pada harga beras merupakan dampak dari kerusakan lahan sawah dan gangguan logistik akibat bencana di wilayah Aceh. Sementara itu, inflasi pada tarif listrik lebih disebabkan oleh fenomena *low-base effect* dari kebijakan tarif pada bulan Januari dan Februari tahun 2025 yang menciptakan basis perbandingan tahunan yang lebih rendah. Di samping itu, emas perhiasan terus mencatatkan kenaikan harga, mengindikasikan tingginya permintaan aset aman (*safe haven*) di tengah eskalasi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

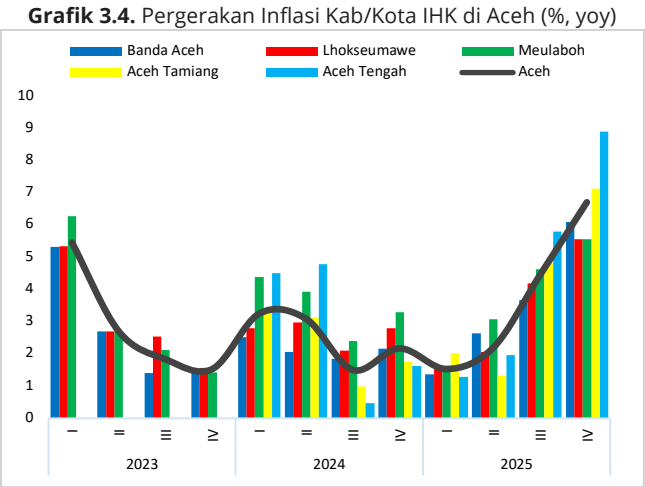
Pada Triwulan I 2026, laju inflasi tahunan Provinsi Aceh diperkirakan akan menurun dibandingkan Triwulan IV 2025. Hal ini didorong oleh perkembangan fase rehabilitasi pasca bencana, termasuk pemulihan akses transportasi yang sempat terputus dan rekonstruksi infrastruktur utama di sentra-sentra produksi. Tekanan harga juga diprediksi akan menurun sejalan dengan berlangsungnya masa panen beberapa komoditas strategis. Dari sisi minyak dan gas, penyesuaian tarif BBM nonsubsidi per 1 Februari 2026 serta kebijakan diskon tarif transportasi dalam menyambut HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H (periode 19 Februari – 21 Maret 2026) diproyeksikan mampu menahan gejolak harga. Meskipun demikian, risiko peningkatan harga emas perhiasan akibat ketegangan geopolitik global yang terus terekskalasi tetap perlu diwaspadai sebagai pendorong inflasi pada Triwulan I 2026.

Dalam memitigasi potensi tekanan inflasi pada triwulan I 2026, penguatan kolaborasi serta sinergi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh menjadi faktor penting untuk memastikan realisasi inflasi tetap berada pada rentang sasaran nasional $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Strategi pengendalian yang khusus diperlukan terutama terhadap komoditas pangan yang menjadi kelompok dengan pergerakan dan gejolak harga tertinggi. Upaya pengendalian harga

kelompok ini dapat dilakukan melalui implementasi strategi 4K, yakni menjamin Keterjangkauan Harga, memastikan Ketersediaan Pasokan, menjaga Kelancaran Distribusi, serta membangun Komunikasi Efektif untuk mengelola ekspektasi pasar. Langkah-langkah strategis ini akan dapat diintegrasikan dengan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Aceh.

3.4. Inflasi Spasial

Seluruh kabupaten dan kota pantauan di Provinsi Aceh mencatatkan peningkatan tekanan inflasi pada triwulan IV 2025. Secara tahunan, Aceh Tengah mengalami inflasi tertinggi mencapai 8,90% (yoy), sedangkan tingkat inflasi terendah tercatat di Meulaboh dan Lhokseumawe yang masing-masing sebesar 5,56% (yoy). Jika dilihat dari inflasi secara bulanan, Aceh Tengah juga mencatatkan kenaikan harga paling tinggi dengan inflasi sebesar 4,95% (mtm). Sebaliknya, Lhokseumawe mengalami tekanan inflasi bulanan paling rendah, yakni sebesar 2,39% (mtm). Peningkatan inflasi yang signifikan di Aceh Tengah mengindikasikan besarnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025, dimana hal tersebut mengganggu stabilitas harga di tingkat lokal.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Di Kota Banda Aceh, komoditas emas perhiasan tercatat sebagai komoditas penyumbang inflasi tahunan (yoy) tertinggi dengan andil sebesar 1,30%.

Di sisi lain, inflasi tertahan oleh deflasi pada komoditas sekolah menengah atas, yang memberikan andil sebesar -0,11%.

Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% ,yoy)

Banda Aceh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Emas Perhiasan	1,30	Sekolah Menengah Atas	-0,11
Ikan Tongkol	0,42	Tomat	-0,08
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,36	Sekolah Menengah Pertama	-0,07
Cabai Merah	0,34	Baju Muslim Wanita	-0,04
Beras	0,29	Deterjen Cair	-0,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selanjutnya, komoditas emas perhiasan juga tercatat sebagai komoditas penyumbang inflasi tahunan (yoy) terbesar dengan andil sebesar 0,64% di Lhokseumawe. Sebaliknya, tekanan inflasi di kota ini tertahan oleh komoditas tomat yang mengalami deflasi dengan kontribusi sebesar -0,13%.

Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% ,yoy)

Lhokseumawe			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Emas Perhiasan	0,64	Tomat	-0,13
Ikan Tongkol/Ikan Ambu-ambu	0,58	Bawang Putih	-0,04
Nasi dengan Lauk	0,54	Garam	-0,03
Ikan Dencis	0,38	Sabun Mandi Cair	-0,02
Beras	0,37	Besi Beton	-0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Inflasi di Meulaboh didorong oleh komoditas emas perhiasasn sebagai penyumbang inflasi tahunan terbesar dengan andil 1,55% (yoy). Meski demikian, laju kenaikan harga di wilayah ini tertahan oleh komoditas tomat yang mencatatkan deflasi dengan andil sebesar -0,31%.

Tabel 3.15 Andil Inflasi di Meulaboh (% ,yoy)

Meulaboh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Emas Perhiasan	1,55	Tomat	-0,31
Cabai Merah	0,37	Popok Bayi Sekali Pakai/Diapers	-0,18
Beras	0,34	Angkutan Udara	-0,10
Nasi dengan Lauk	0,30	Deodorant	-0,04

Sigaret Kretek Tangan (SKT)	0,25	Detergen Cair	-0,04
-----------------------------	------	---------------	-------

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sebagai salah satu wilayah yang terdampak langsung oleh bencana hidrometeorologi, Aceh Tengah mencatatkan komoditas beras sebagai pendorong utama inflasi dengan andil tahunan yang sangat signifikan, yakni sebesar 2,46%.

Tabel 3.16 Andil Inflasi di Aceh Tengah (% ,yoy)

Aceh Tengah			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Beras	2,46	Tomat	Tidak Dipublikasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sementara itu, untuk wilayah Aceh Tamiang, pencatatan inflasi hanya tersedia hingga bulan November 2025. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak bencana hidrometeorologi terparah di Provinsi Aceh.

Hingga periode November 2025, inflasi di Aceh Tamiang utamanya didorong oleh komoditas cabai merah dengan andil sebesar 1,08% (yoy). Di sisi lain, laju inflasi di wilayah ini tertahan oleh komoditas tomat yang mencatatkan deflasi dengan andil terbesar, yaitu -0,37% (yoy).

Tabel 3.17 Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% ,yoy)

Aceh Tamiang*			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Cabai Merah	1,08	Tomat	-0,37
Beras	0,34	Bawang Putih	-0,13
Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu	0,33	Bawang Merah	-0,09
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,29	Gula Pasir	-0,06
Telur Ayam Ras	0,28	Udang Basah	-0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (November 2025)

3.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Upaya dalam menjaga inflasi dalam sasaran 2,5% ± 1% di Provinsi Aceh dihadapkan pada tantangan yang beragam. Tekanan tersebut berasal dari dampak pasca bencana hidrometeorologi pada akhir 2025, siklus konsumsi tinggi pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Maulid Nabi dan tradisi Meugang, hingga

dinamika geopolitik global yang kian memanas. Selain itu, anomali cuaca yang membuat pergeseran musim panen serta kerusakan lahan pada sentra produksi akibat bencana juga menjadi faktor risiko yang perlu diwaspadai.

Menanggapi kondisi tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh bersama TPID Provinsi Aceh menempuh langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam kerangka strategi 4K adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Melaksanakan program sinergi operasi pasar murah melalui SPHP dan GPM di 23 kab/kota di Provinsi Aceh, dengan prioritas pada 5 kab/kota IHK, serta menggelar Pasar Murah Daging khusus untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat tradisi Meugang dan HBKN (Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha).
- b. Melakukan sidak pasar secara berkala dalam memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan selama HBKN Ramadhan.
- c. Menyalurkan bantuan dan pelatihan (*capacity building*) kepada petani untuk meningkatkan produktivitas, khususnya di wilayah terdampak bencana.
- d. Memperkuat sinergi dengan BUMN dalam menjamin ketersediaan energi dan cadangan pangan pemerintah.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Melakukan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- b. Mengakselerasi program Kerja Sama antar Daerah (KAD) antar daerah sentra dan non sentra, terutama untuk komoditas pangan strategis, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan.
- c. Mendorong program peningkatan produksi di daerah sentra melalui optimalisasi *Good Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan.
- d. Mendorong *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk

meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis.

- e. Melakukan fasilitasi *contract farming* antara UMKM dan kelompok tani produsen pangan strategis.
- f. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam rangka pemantauan pasokan dan pengendalian inflasi.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Mendorong program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) atau Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) yang efektif dan terarah pada komoditas strategis penyebab inflasi, terutama pada komoditas pangan.
- b. Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan antar daerah.

4. Komunikasi Efektif

- a. Mengoptimalkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai *early warning system* inflasi.
- b. Melakukan pemantauan pada arus keluar/masuk barang terutama komoditas pangan strategis melalui optimalisasi jembatan timbang dalam rangka mengestimasi kecukupan pasokan komoditas pangan strategis.
- c. Menyelenggarakan *capacity building* kepada TPID se-Provinsi Aceh dengan tujuan *refreshment*, peningkatan pemahaman, serta penguatan sinergi dalam pengendalian inflasi.
- d. Melaksanakan *high level meeting* TPID Provinsi Aceh dan TPID Kabupaten/Kota IHK di Provinsi Aceh dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi serta antisipasi risiko inflasi tahun 2026.
- e. Melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan yang dihadiri TPID Provinsi Aceh dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- f. Melaksanakan rapat evaluasi TPID sebagai bentuk evaluasi kegiatan TPID selama tahun 2025 dan langkah upaya yang akan dilakukan di tahun 2026.



BAB IV

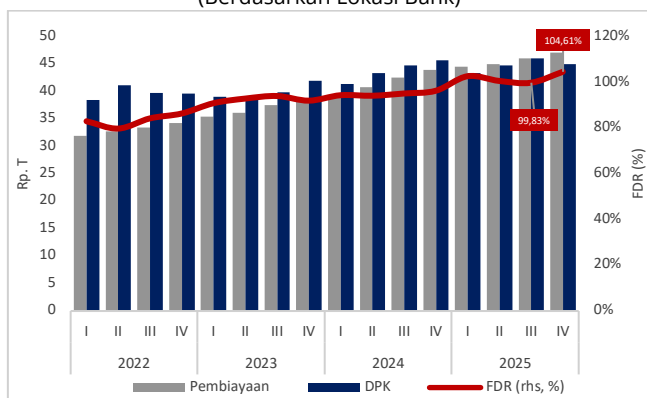
PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 masih terjaga di tengah terjadinya bencana hidrometeorologi. Hal ini tercermin dari masih positifnya pertumbuhan pembiayaan dengan kualitas yang baik seiring masih rendahnya *Non Performing Financing* (NPF). Selain itu, inklusifitas pembiayaan menunjukkan perkembangan yang baik tercermin dari rasio pembiayaan untuk UMKM yang tercatat sebesar 26,03%. Namun demikian, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,51% (yoy).

4.1. Kondisi Umum

Kinerja intermediasi perbankan terpantau tetap terjaga pada triwulan IV 2026, tercermin dari masih positifnya pertumbuhan penyaluran pembiayaan di tengah penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan pada triwulan IV tercatat Rp47,05 triliun atau meningkat sebesar 6,97% (yoy). Namun demikian, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp44,98 triliun atau menurun sebesar -1,51% (yoy). Dengan demikian, *Financing Deposit Ratio* (FDR) tercatat 104,61% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 99,83% (Grafik 4.1). Peningkatan FDR ini menunjukkan pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan DPK pada periode triwulanan.

Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)



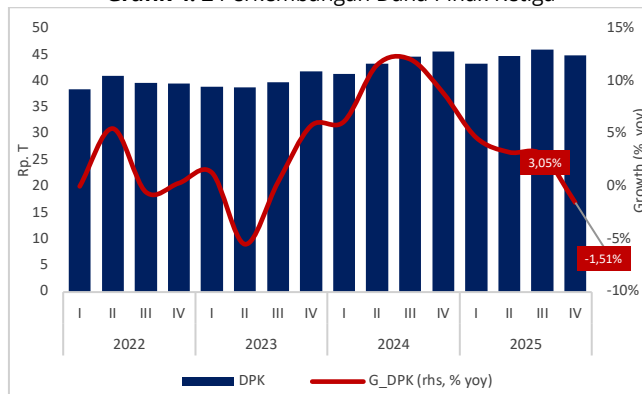
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan IV 2025 menunjukkan kondisi yang terjaga. Secara agregat, risiko pembiayaan di Provinsi Aceh masih terjaga dalam batas aman yang tercermin dari *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 2,22% meskipun mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya.

Kinerja penghimpunan DPK terpantau mengalami penurunan. Pada triwulan IV 2025, nominal DPK mencapai Rp44,98 triliun, lebih rendah dari triwulan sebelumnya dengan nominal Rp46,06 triliun serta berkontraksi sebesar 1,51% (yoy). Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan pada DPK pemerintah sebesar -32,05% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan III 2025. Kemudian, DPK korporasi tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 9,48% (yoy), atau meningkat

dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 11,64% (yoy).

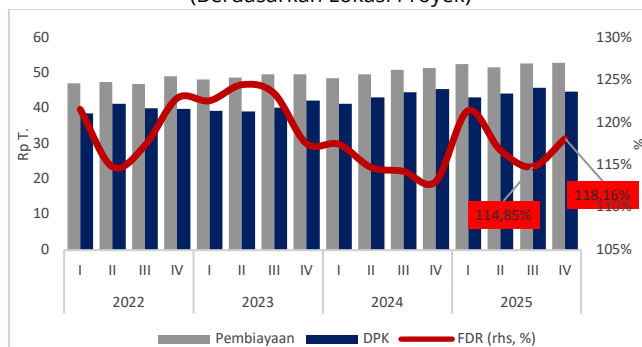
Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran pembiayaan menunjukkan peningkatan secara triwulanan. Penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi proyek pada triwulan IV 2025 sebesar Rp53,16 triliun meningkat sebesar 0,48% (qtoq), namun melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, FDR berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar 118,16% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 114,85% (Grafik 4.3).

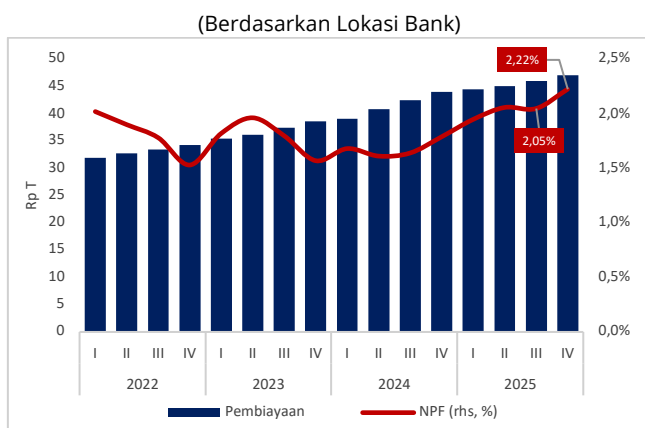
Grafik 4.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan lokasi bank masih pada rentang aman. NPF pada triwulan IV 2025 mencapai 2,22%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang sebesar 2,05% (Grafik 4.4.), namun masih berada di bawah *threshold* 5%.

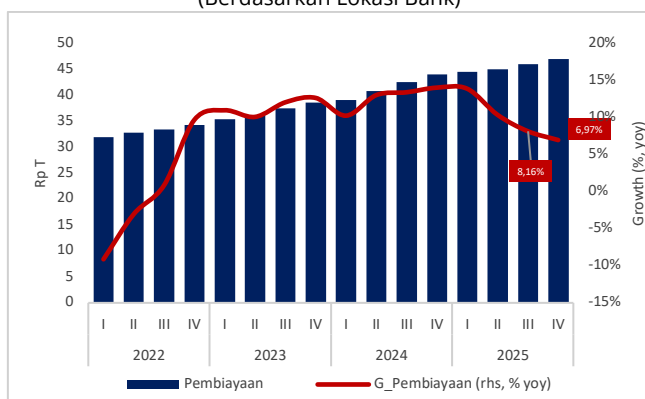
Grafik 4.4 Perkembangan *Non-Performing Financing*



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Jika dilihat berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan masih tumbuh tinggi namun melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan berdasarkan lokasi bank tumbuh senilai 6,97% (yoy), namun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,16% (yoy).

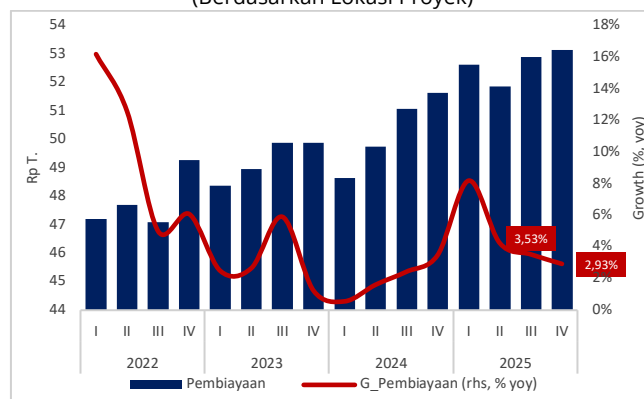
Grafik 4.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Selain itu, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dari luar Aceh juga menunjukkan pertumbuhan. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp53,16 triliun, atau tumbuh pada tingkat 2,93% (yoy). Penyaluran pembiayaan tersebut meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp52,90 triliun. Selain itu, secara nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan nominal pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan di Aceh masih mengandalkan sumber dana dari perbankan di luar Aceh.

Grafik 4.6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)



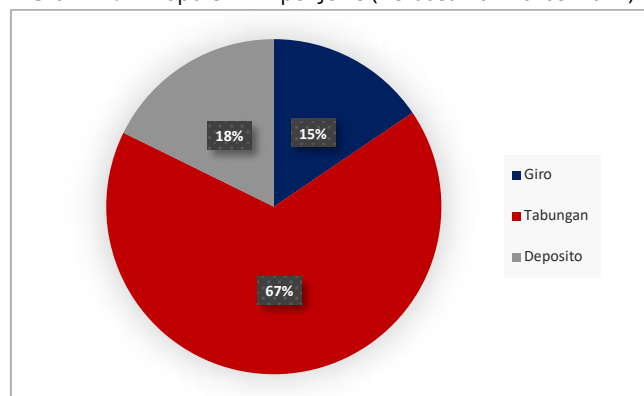
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2. Intermediasi Perbankan

4.2.1. DPK Menurut Jenisnya

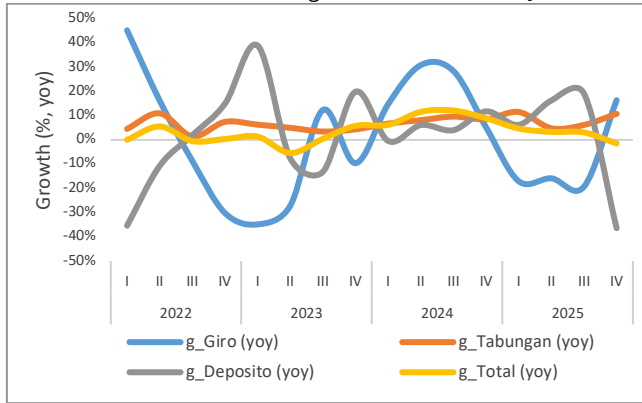
Tabungan masih mendominasi komposisi DPK di Aceh. Pada triwulan IV 2025, DPK di Aceh didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 67%, diikuti deposito sebesar 18% dan giro sebesar 15%. Secara nominal, total DPK pada triwulan IV 2025 adalah sebesar Rp44,99 triliun, yang terdiri dari tabungan Rp30,02 triliun, deposito sebesar Rp7,97 triliun, dan giro Rp6,98 triliun.

Grafik 4.7 Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

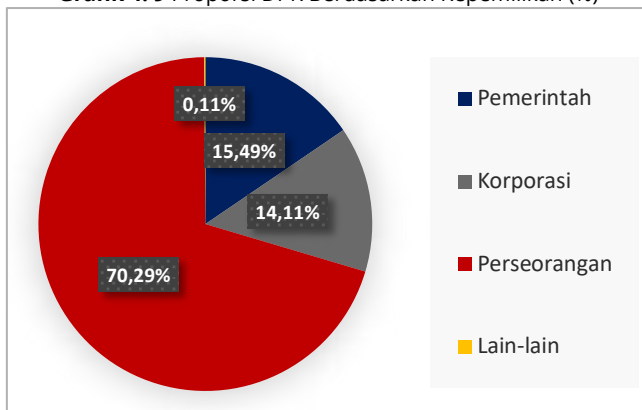
Pada triwulan laporan, jenis DPK yang mengalami pertumbuhan yaitu giro dan tabungan. Pada triwulan IV 2025, giro dan tabungan merupakan jenis DPK yang mengalami pertumbuhan positif yaitu masing-masing sebesar 16,38% (yoy) dan 10,74% (yoy). Sementara, deposito merupakan komponen DPK yang mengalami kontraksi sebesar 36,51% (yoy), menurun jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,10% (yoy).

Grafik 4. 8 Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

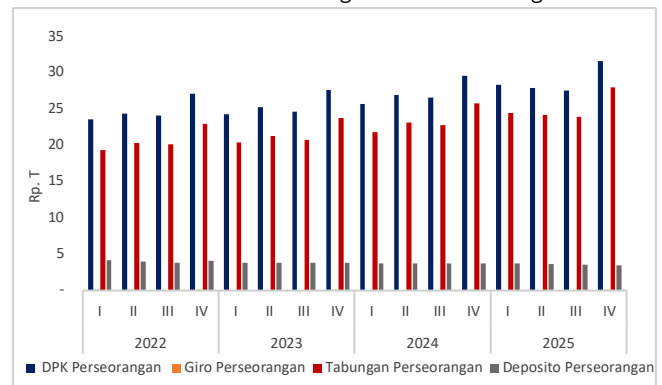
4.2.2. DPK Menurut Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikannya, DPK di Aceh masih didominasi oleh kepemilikan perseorangan. DPK milik perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 70,29%. Sementara, DPK milik pemerintah dan korporasi masing-masing memiliki porsi sebesar 15,49% dan 14,11%.

Grafik 4. 9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)

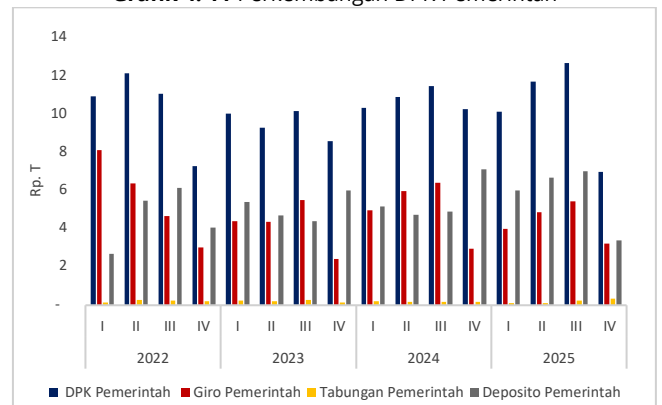
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK perseorangan pada triwulan laporan terdiri dari tabungan memiliki porsi sebesar 88,65%, deposito memiliki porsi sebesar 10,90%, dan giro memiliki porsi sebesar 0,44%. Secara pertumbuhan, DPK perseorangan dalam bentuk giro dan tabungan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 56,53% (yoy) dan 8,75% (yoy). Sementara itu deposito mengalami kontraksi sebesar 7,10% (yoy).

Grafik 4. 10 Perkembangan DPK Perseorangan

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

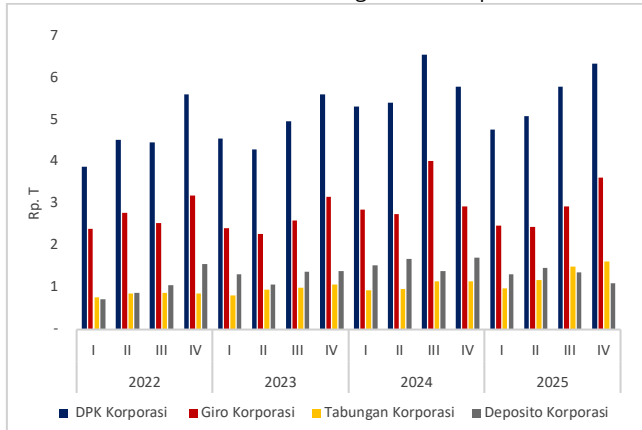
Pada triwulan laporan, DPK pemerintah mengalami kontraksi sebesar 32,05% (yoy). Kontraksi tersebut disebabkan oleh penurunan deposito pemerintah sebesar -52,19% (yoy). Di sisi lain, giro pemerintah pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 8,46% (yoy). Kemudian, tabungan pemerintah mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 109,07% (yoy).

Grafik 4. 11 Perkembangan DPK Pemerintah

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK korporasi masih didominasi oleh giro. Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan terdiri dari giro sebesar 57%, deposito sebesar 17,52%, dan tabungan sebesar 25,49%. DPK korporasi giro mengalami pertumbuhan sebesar 23,15% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 27,05% (yoy). Selanjutnya, tabungan korporasi turut mengalami pertumbuhan sebesar 6,74% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 41,47 (yoy). Sedangkan DPK jenis deposito mengalami perlambatan sebesar -35,22% (yoy).

Grafik 4. 12 Perkembangan DPK Korporasi

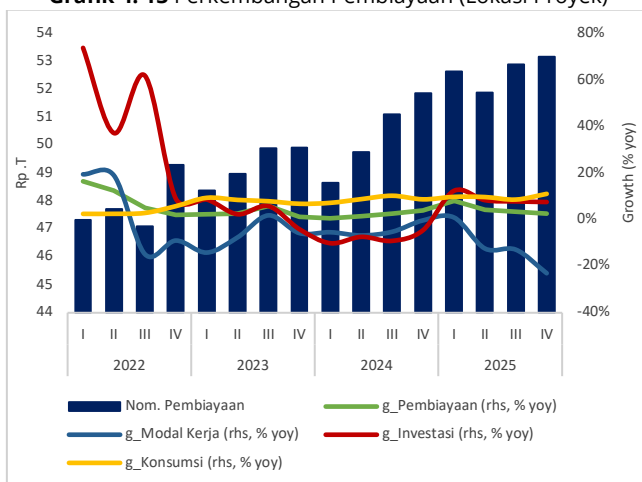


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 2,49% (yoy), yang masih didominasi oleh pembiayaan **konsumsi**. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif perlu terus didorong, utamanya untuk lapangan usaha atau sektor prioritas agar dapat memberikan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Pertumbuhan pembiayaan di triwulan laporan didorong oleh jenis pembiayaan konsumsi dan investasi yaitu masing-masing sebesar 11,10% (yoy) dan 7,55% (yoy). Sedangkan pembiayaan modal kerja yang mengalami kontraksi sebesar 23,04%.

Grafik 4. 13 Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek)

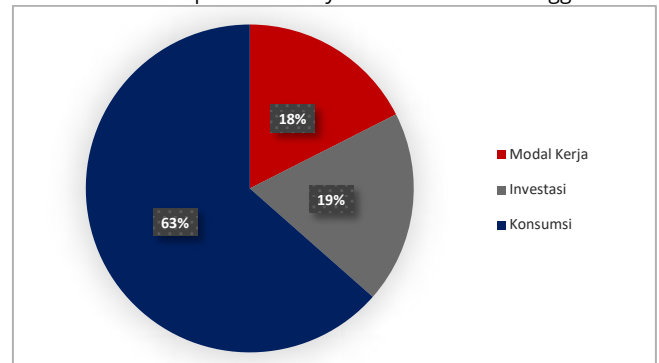


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 63%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 27%. Adapun pembiayaan dari sektor

produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja, masing-masing memiliki porsi sebesar 19% dan 18% dari total pembiayaan pada triwulan laporan.

Grafik 4. 14 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

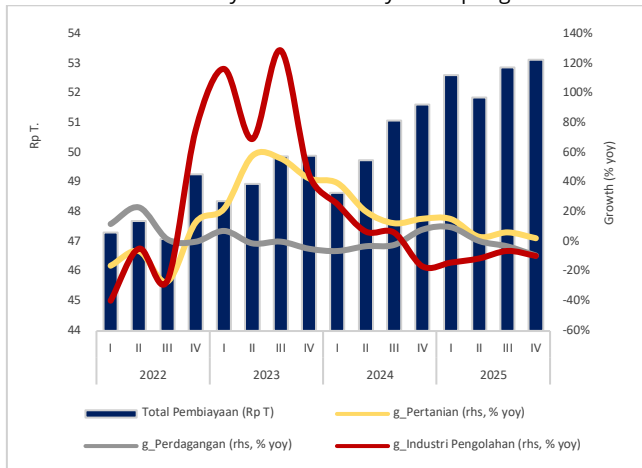
Peningkatan pembiayaan konsumsi sejalan dengan terjaganya optimisme konsumen. Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis hingga Desember 2025. Tercatat Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) senilai 104,38. Kemudian, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatat nilai 110,22 pada triwulan IV. Angka tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 107,29.

4.2.3. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha (LU)

Pangsa pembiayaan terbesar menurut lapangan usaha didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada triwulan IV 2025, porsi pembiayaan terhadap LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat 11,77%. Kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU ini mengalami kontraksi sebesar 9,07% (yoy), turun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -2,91% (yoy). Sementara itu, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan memiliki porsi pembiayaan masing-masing sebesar 9,20% dan 5,49%. Pada triwulan IV 2025, kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Pertanian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,58% (yoy), namun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 6,53% (yoy). Sedangkan LU Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 9,07%

(yoy) namun tidak sedalam pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,91% (yoy).

Grafik 4. 15 Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha

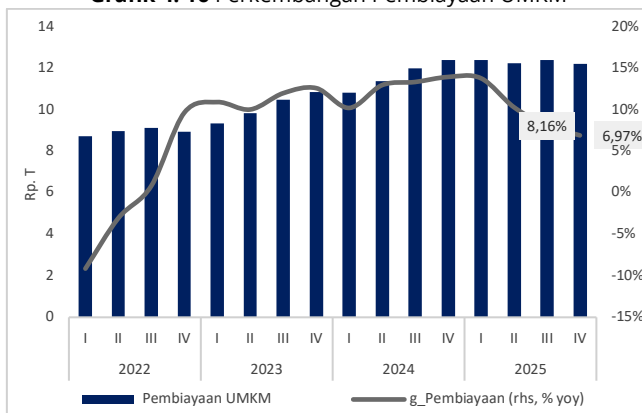


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.4. Pembiayaan UMKM

Kinerja pembiayaan UMKM pada triwulan IV 2025 masih tumbuh melambat. Kinerja pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM di Aceh tercatat tumbuh sebesar 6,97% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,16% (yoy). Secara nominal, pembiayaan UMKM pada triwulan IV mengalami penurunan yakni sebesar Rp12,24 triliun, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar Rp12,43 triliun. Sementara itu, rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan IV 2025 sebesar 26,03%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan inklusi pembiayaan di Aceh.

Grafik 4. 16 Perkembangan Pembiayaan UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah.

Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM. Hal ini dilakukan dengan menetapkan target proporsi pembiayaan

UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio* sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan di seluruh wilayah Indonesia juga turut mendorong kinerja UMKM melalui berbagai program pendampingan.

4.3. Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh

KPw BI Provinsi Aceh melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPw BI Provinsi Aceh dalam mendorong peningkatan akses keuangan bagi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM diantaranya melalui program pengembangan UMKM seperti pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan melalui optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dan survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID). KPw BI Provinsi Aceh turut melakukan fasilitasi UMKM pada perluasan akses pasar maupun promosi perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui program-program seperti Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Industri Kreatif Syariah (IKRA).

Di samping itu, KPw BI Provinsi Aceh menyelenggarakan program pengembangan kapasitas wirausaha melalui Program Pengembangan Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI). Program yang diadakan tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja wirausaha di Provinsi Aceh sehingga dapat naik kelas, terutama bagi wirausaha

yang mendukung program pengendalian inflasi. Di samping itu, program WUBI ditujukan untuk mendorong ekspor atau substitusi impor, pariwisata, serta mendukung ekonomi dan keuangan syariah, dan mengembangkan produk dan jasa unggulan daerah. Lebih lanjut, melalui program WUBI dapat menciptakan ekosistem wirausaha di Provinsi Aceh yang mendukung upaya percepatan pengembangan usaha sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian daerah.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh senantiasa melakukan sinergi dengan perbankan syariah di Aceh dalam mendorong pembiayaan. Pada Meuseuraya Festival 2025, KPwBI Provinsi Aceh bersama Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah melakukan penyaluran pembiayaan kepada UMKM dengan total nilai sebesar Rp1,45 miliar. Meuseuraya Festival akan kembali diadakan pada 2026 dengan komitmen dan semangat untuk meningkatkan pembiayaan bagi UMKM.



BAB V

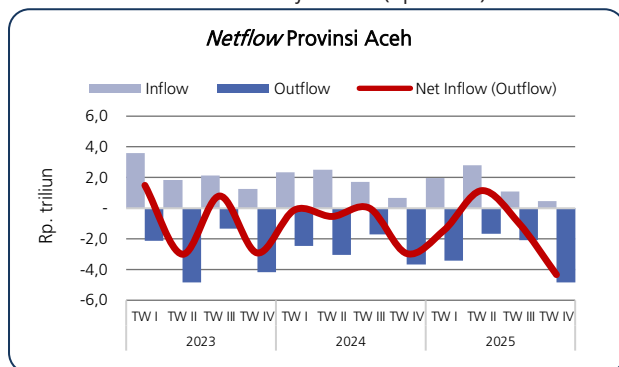
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan IV 2025, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi *net outflow* pada triwulan laporan. Sementara, metode pembayaran non tunai seperti, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pengedaran uang kartal mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan IV 2025. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp4,3 triliun dengan komposisi total uang kartal masuk (*inflow*) sebesar Rp0,48 triliun dan total uang kartal keluar (*outflow*) sebesar Rp4,8 triliun (Grafik 5.1). *Net outflow* pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa peredaran uang kartal di masyarakat lebih besar dibandingkan dengan setoran kembali ke Bank Indonesia. Kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh terhadap uang kartal pada triwulan IV 2025 relatif tinggi.

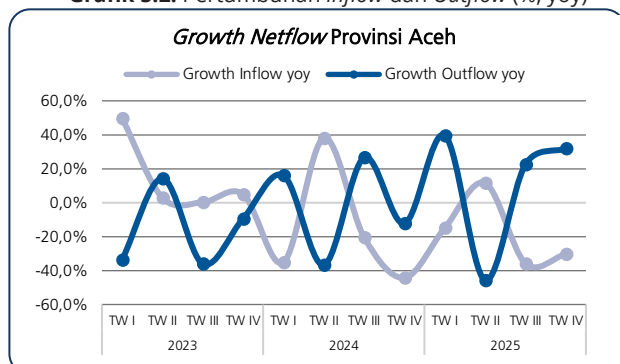
Grafik 5.1. Netflow Kas (Rp triliun)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara tahunan, tingkat *outflow* pada triwulan IV 2025 naik sebesar 31,9% (yoy) sedangkan *inflow* masih berkontraksi sebesar 30,4% (yoy) (Grafik 5.2). Secara keseluruhan, peredaran uang kartal mengalami kenaikan karena adanya peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga bertepatan dengan momentum Nataru (Natal dan Tahun Baru).

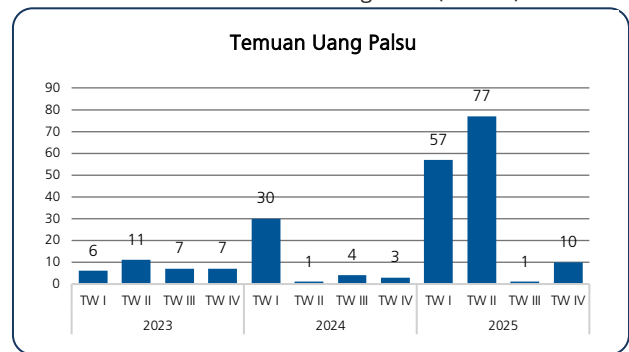
Grafik 5.2. Pertumbuhan Inflow dan Outflow (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kualitas peredaran uang kartal tetap terjaga. Temuan uang yang diragukan keasliannya pada triwulan laporan mengalami kenaikan namun masih dalam batas yang aman, yakni sebanyak 10 lembar terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 6 lembar, pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 lembar, dan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 lembar. (Grafik 5.3).

Grafik 5.3. Temuan Uang Palsu (lembar)

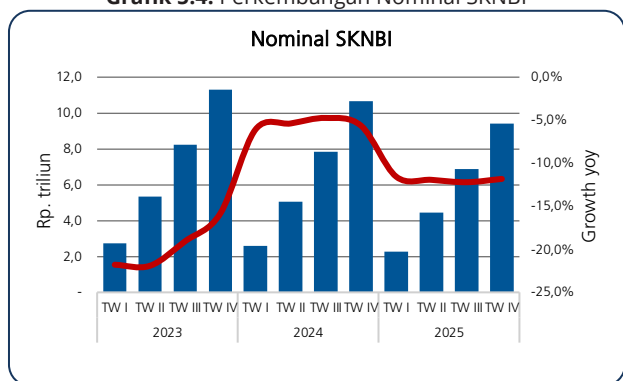


Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

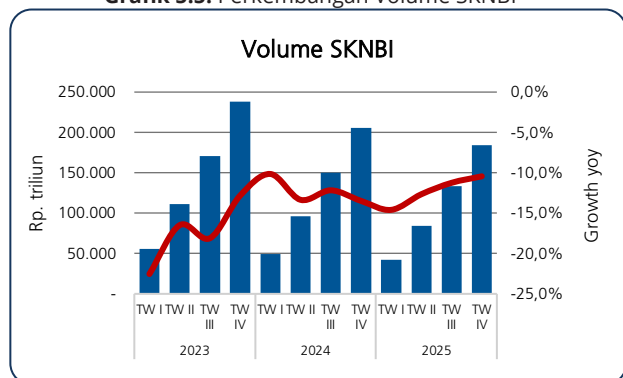
Perkembangan pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, terus menunjukkan tren positif. Sejalan dengan perkembangan digitalisasi di provinsi Aceh, preferensi masyarakat Aceh dalam melakukan transaksi secara non tunai turut mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya pembayaran menggunakan instrumen APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, instrumen Uang Elektronik (UE) baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh. Tren penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) juga bergerak positif diiringi dengan penurunan tren pembayaran melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) ritel.

Nominal transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui SKNBI pada triwulan IV 2025 tumbuh 36,5% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan berkontraksi sebesar 11,8% (yoy) atau sebesar Rp9 triliun dari Rp10,7 triliun pada triwulan IV 2025 (Grafik 5.4).

Grafik 5.4. Perkembangan Nominal SKNBI

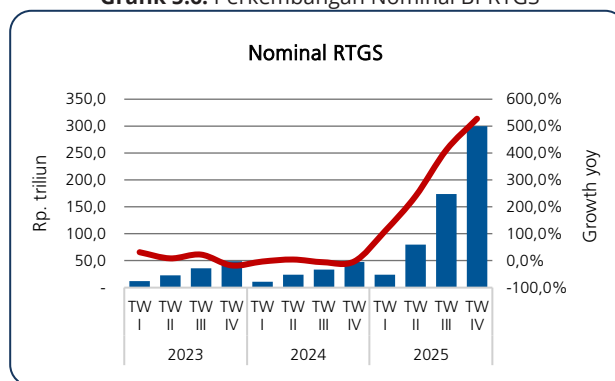
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan tumbuh 38,6% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebanyak 184.398 transaksi atau terkontraksi sebesar 10,4% (yoy) dari 205.883 transaksi pada triwulan IV 2025 (Grafik 5.5).

Grafik 5.5. Perkembangan Volume SKNBI

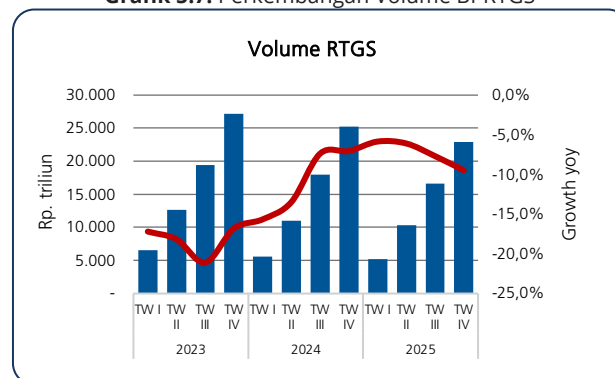
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan sistem pembayaran nilai besar dalam Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) secara nominal tercatat meningkat pada triwulan laporan. Transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp299,9 triliun atau naik sebesar 527,5% (yoy) dari Rp47,8 triliun pada triwulan IV 2025. Secara triwulanan (qtq), nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan meningkat sebesar 72% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 5.6).

Grafik 5.6. Perkembangan Nominal BI-RTGS

Sumber: Bank Indonesia, diolah

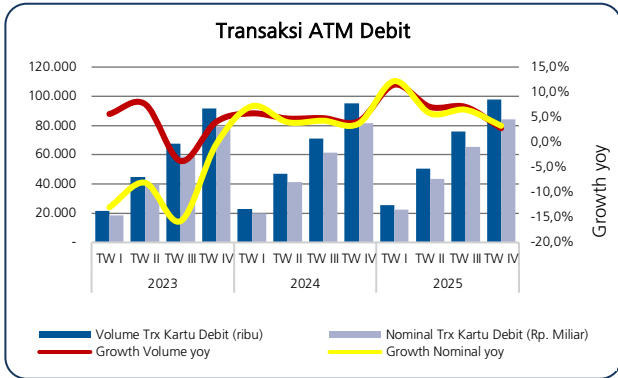
Jika dilihat secara volume, transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan naik 37,7% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebanyak 22.884 transaksi atau terkontraksi sebesar 9,5% (yoy) dari 25.278 transaksi pada triwulan IV 2025 (Grafik 5.7).

Grafik 5.7. Perkembangan Volume BI-RTGS

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, transaksi menggunakan kartu ATM debit mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan. Volume transaksi pada triwulan laporan tercatat naik sebesar 2,8% (yoy) menjadi 97 juta transaksi. Sementara nominal transaksi kartu ATM debit tercatat sebesar Rp84 triliun atau tumbuh sebesar 3,3% (yoy) (Grafik 5.8).

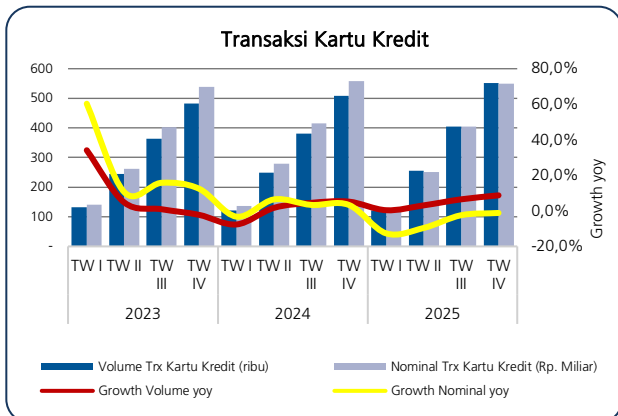
Grafik 5.8. Transaksi ATM Debit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, dari sisi kartu kredit juga mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan. Volume transaksi naik sebesar 8,7% (yoy) atau menjadi sebesar 552 ribu transaksi (Grafik 5.9). Secara nominal, pada triwulan laporan transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp550 miliar atau berkontraksi sebesar 1,2% (yoy). Selama triwulan IV 2025, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp136,9 miliar atau 94,4% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 141.951 transaksi atau 96,8% dari total volume transaksi.

Grafik 5.9. Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

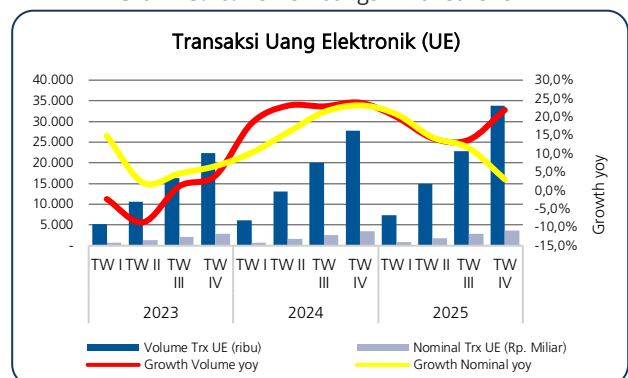
Seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan IV 2025 mencapai Rp3.616 miliar atau naik sebesar 3,0% (yoy). Sementara volume transaksi UE naik sebesar 21,9% (yoy) atau sebanyak 33 juta transaksi selama triwulan IV 2025 (Grafik 5.10). Tren transaksi UE yang terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya

minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*.

Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Meningkatnya minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce*. Selama triwulan IV 2025, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp629,3 miliar atau 62,1% dari total nominal transaksi dengan volume sebanyak 9,3 juta transaksi atau 86,5% dari total volume transaksi.

Implementasi QRIS menjadi pendorong meningkatnya transaksi UE berbasis server (*server based*) di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui QRIS mengalami peningkatan yang tercermin dari perkembangan volume dan nominal transaksinya. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

Grafik 5.10. Perkembangan Transaksi UE

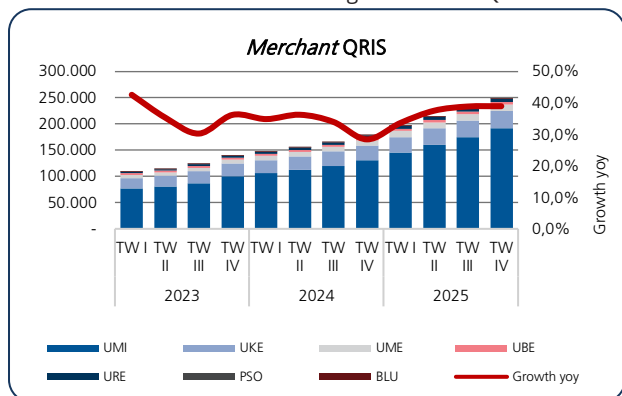


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Peningkatan transaksi QRIS didukung oleh terus meningkatnya jumlah *merchant*. Hingga triwulan IV 2025, terdapat 248.708 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 5.11).

Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 39% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 178.926 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 8,1% (qto) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 230.036 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 191.392 *merchant* (76,9%).

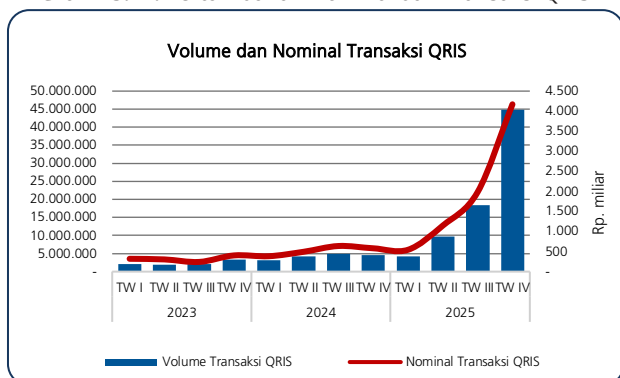
Grafik 5.11. Perkembangan *Merchant QRIS*



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan IV 2025 telah terdapat 720.687 pengguna atau bertambah sebanyak 22.574 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan IV 2025 terdapat 44,9 juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp4.171 miliar (Grafik 5.12). Aceh Timur dan Langsa sebagai penyumbang kenaikan volume dan nominal QRIS. Kenaikan disebabkan oleh peningkatan transaksi QRIS oleh masyarakat utamanya di sektor perhotelan pasca bencana yang melanda Provinsi Aceh.

Grafik 5.12. Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

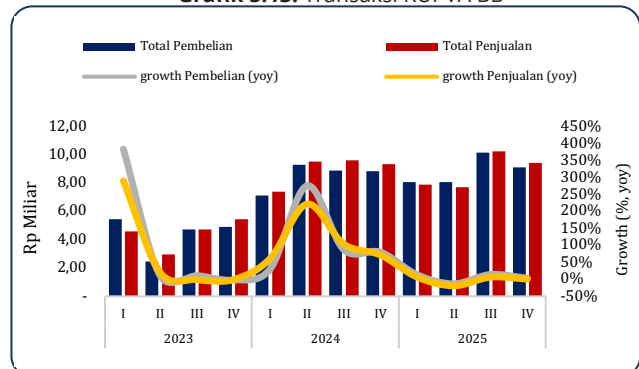
5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil, Bank Indonesia juga berperan sebagai regulator Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di daerah.

Hingga triwulan IV 2025, terdapat 13 (tiga belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 5 (lima) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan IV 2025, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan meningkat sebesar 1,87% (yoy) menjadi Rp18,57 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp18,23 miliar.

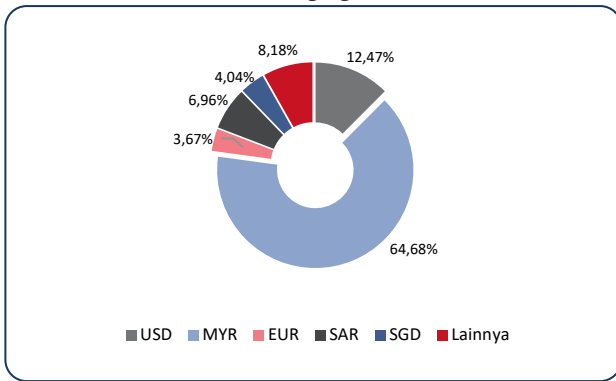
Grafik 5.13. Transaksi KUPVA BB



Sumber: LKPBU, diolah

Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan menunjukkan adanya peningkatan. Pembelian UKA di Aceh pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 3,21% (yoy) menjadi Rp9,13 miliar dari Rp8,85 miliar pada triwulan IV 2024. Begitu pula dengan penjualan UKA pada triwulan laporan yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,61% (yoy) dari Rp9,38 miliar pada triwulan IV 2024 menjadi Rp9,43 miliar (Grafik 5.13).

Grafik 5.14. Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 64,68% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 12,47% (Grafik 5.14). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

5.4. Penyaluran Program Sembako dan PKH

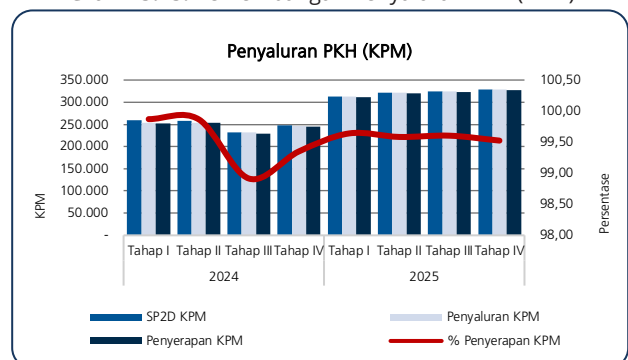
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Sesuai instruksi Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyaluran secara tunai dilakukan oleh PT Pos Indonesia, sedangkan penyaluran secara non tunai dilakukan oleh Himbara - BSI. Jenis bantuan sosial yang disalurkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan

implementasi penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap IV tahun 2025 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 100% kepada KPM (Grafik 5.15). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap IV tercatat sebanyak 327.818 atau telah mencapai 99,52% dari jumlah penyaluran sebanyak 329.383 KPM. Penyaluran PKH Tahap IV dilakukan secara non tunai oleh Himbara-BSI di 513 Kab/Kota dan tunai oleh PT Pos Indonesia di 73 Kab/Kota.

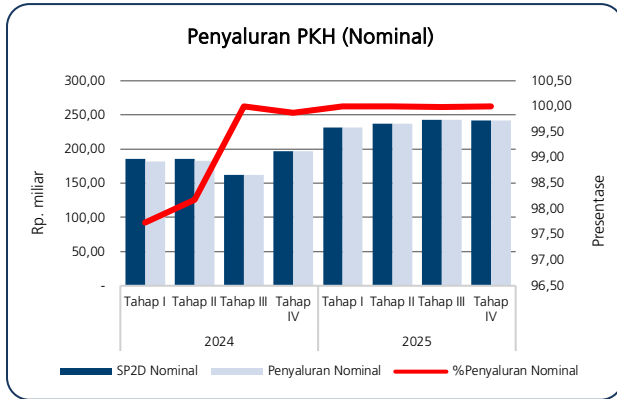
Grafik 5.15. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

Dari aspek nominal, besaran bantuan yang disalurkan pada setiap tahap mengalami fluktuasi seiring dengan penyesuaian terhadap data KPM yang diperbarui secara berkala oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada Tahap IV tahun 2025, nominal bantuan yang disalurkan mencapai sebesar Rp241,8 miliar dengan tingkat penyaluran PKH yang telah mencapai 100% (Grafik 5.16). Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahap IV tahun 2024, yaitu sebesar Rp196,9 miliar.

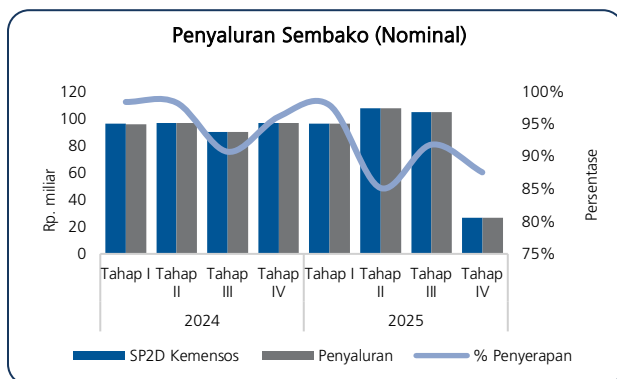
Grafik 5.16. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Pada Tahap IV 2025, nominal bantuan yang disalurkan Program Sembako sebesar Rp27 miliar dengan persentase nominal penyaluran Program Sembako telah mencapai 100% (Grafik 5.17). Jumlah tersebut turun dibandingkan Tahap IV 2024 sebesar Rp97 miliar. Program Sembako Tahap IV dilakukan secara non tunai oleh Himbara-BSI di 513 Kab/Kota dan tunai oleh PT Pos Indonesia di 73 Kab/Kota.

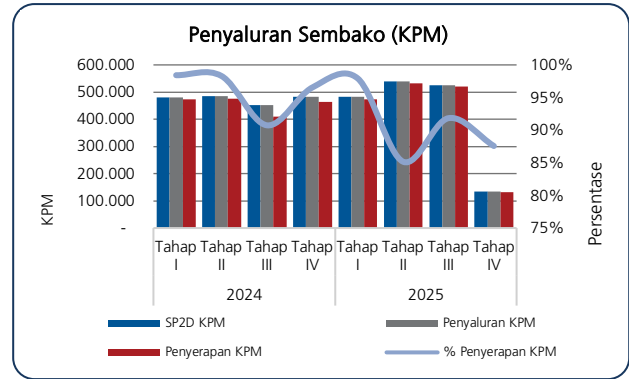
Grafik 5.17. Perkembangan Program Sembako (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, jumlah KPM Program Sembako yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap IV sebesar 132.644 KPM atau telah mencapai 87,56% dari target jumlah penerima sebanyak 134.032 KPM (Grafik 5.18). Penyaluran didukung oleh peningkatan efektivitas proses penyaluran oleh BSI.

Grafik 5.18. Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah



BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada November 2025 diikuti oleh angka kemiskinan yang turut mengalami penurunan pada November 2025. Aktivitas perekonomian yang tetap berjalan, serta dukungan program bantuan dan pemulihan pascabencana, turut berperan dalam menjaga daya beli dan keberlangsungan pendapatan masyarakat.

6.1. Ketenagakerjaan

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun. Pada November 2025, tingkat TPT di Provinsi Aceh tercatat sebesar 5,60%, mengalami penurunan sebesar 0,04% poin dibandingkan Agustus 2025 sebesar 5,64%. Sepanjang Agustus 2024 hingga Agustus 2025, terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4000 orang. Penurunan TPT juga didorong oleh meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki pada bulan November 2025 yang tercatat sebesar 82,52%, meningkat dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 80,68%. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) laki-laki untuk memproduksi barang dan jasa di Provinsi Aceh.

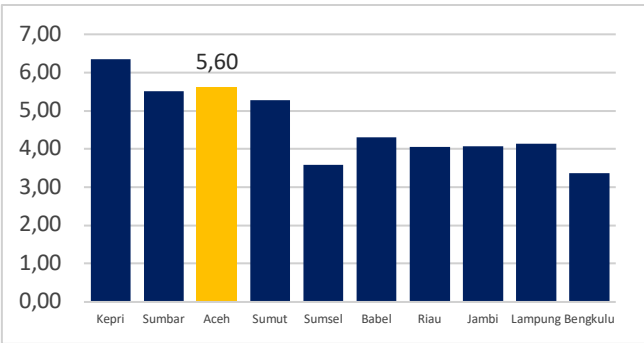
Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TINGKAT PENGANGGURAN %	
Agustus 2025	5,64%
November 2025	5,60% ▼

Sumber: BPS, diolah

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbesar pada November 2025 adalah Lapangan usaha (LU) Administrasi Pemerintahan (1,07%), yang diikuti oleh LU Pertambangan (0,60%), dan LU Perdagangan (0,27%).

Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT di Aceh masih lebih lambat jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Sumatera. TPT di Provinsi Aceh menduduki peringkat ketiga tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh didukung

oleh berbagai faktor. Pada Triwulan IV, kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami perbaikan meskipun hal tersebut disebabkan oleh dampak bencana yang membuat masyarakat ramai menuju tempat makan serta berpindah ke hotel karena pemadaman listrik. Disamping itu, dibukanya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong penyerapan tenaga kerja. Selain itu, perbaikan kondisi ketenagakerjaan ini juga merupakan hasil dari berbagai upaya yang terintegrasi, seperti program pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Tabel 6. 2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2025	2025
	Agustus	November
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.561	2.565
Pengangguran	153	152
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	65,32	65,13
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	5,64	5,60

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Agustus 2025 (%)
Pertanian	38,75
Perdagangan	14,57
Administrasi Pemerintahan	7,22
Industri Pengolahan	6,90
Konstruksi	6,46
Pendidikan	6,26
Akomodasi dan Makan Minum	6,24
Aktivitas Jasa Lainnya	3,52

Sumber: BPS, diolah

LU Pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar. Pangsa penyerapan tenaga kerja pada LU ini mencapai 38,75%. Selanjutnya diikuti oleh sektor Perdagangan (14,57%), Administrasi Pemerintahan (7,22%), Industri Pengolahan (6,90%), Konstruksi (6,46%),

Akomodasi dan Makan Minum (6,24%), dan Jasa Lainnya (3,52%).

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada November 2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 33,94%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan SD ke bawah sebesar 22,29%, SMP sebesar 19,76%, Diploma IV/S1/S2/S3 sebesar 15,26%, SMK sebesar 5,26%, dan diploma sebesar 3,49%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2025.

Tabel 6.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	Agustus	November
	2025	2025
Sekolah Menengah Atas	34,28%	33,94%
Sekolah Dasar ke Bawah	24,21%	22,29%
Sekolah Menengah Pertama	17,60%	19,76%
Diploma IV/S1/S2/S3	14,86%	15,26%
Sekolah Menengah Kejuruan	5,63%	5,26%
Diploma I/II/III	3,42%	3,49%

Sumber: BPS, diolah

Status pekerja di Aceh pada November 2025 mayoritas adalah Buruh/Karyawan/Pegawai. Status pekerjaan penduduk Provinsi Aceh didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai yaitu sebesar 31,81%. Sementara itu, porsi terkecil adalah pekerja berstatus Berusaha Dibantu Buruh Tetap sebanyak 4,39%.

Sementara jika dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja informal mengalami penurunan. Pada November 2025, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 36,20%, sedangkan kegiatan informal sebanyak 63,80%. Dibandingkan Agustus 2025, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan 0,11%. Di sisi lain, penduduk dengan pekerjaan informal mengalami penurunan sebesar

0,11%. Walaupun terjadi penurunan, namun proporsi pekerja informal masih mendominasi. Hal ini patut menjadi perhatian karena pekerja informal cenderung berpendapatan tidak tetap sehingga memiliki kerentanan lebih tinggi.

Tabel 6.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Agustus	November
	2025	2025
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	31,64%	31,81%
Berusaha Sendiri	21,81%	18,51%
Berusaha Dibantu Pekerja Tidak Tetap	14,38%	14,98%
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	11,53%	13,53%
Pekerja Bebas di Non Pertanian	8,18%	8,60%
Pekerja Bebas di Pertanian	8,01%	8,18%
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	4,45%	4,39%

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani⁴ (NTP) Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, NTP tercatat sebesar 124,36, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 125,84. NTP di atas 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Pada Triwulan IV 2025, penurunan NTP terjadi di subsektor Hortikultura (NTPH) sebesar 2,49%, Peternakan (NTPN) sebesar 0,63% dan Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 3,91%. Sedangkan, peningkatan NTP terjadi di subsektor Tanaman Pangan (NTTP) sebesar 1,89% dan Perikanan (NTPT) sebesar 3,48%.

Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani

NILAI TUKAR PETANI (NTP)		
Triwulan III 2025	125,84	
Triwulan IV 2025	124,36	▼

Sumber: BPS, diolah

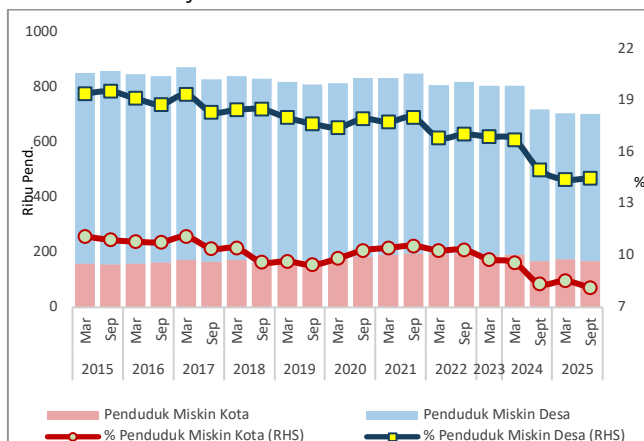
⁴ Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

6.2. Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Provinsi Aceh terus mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data terkini, persentase kemiskinan di Provinsi Aceh pada September 2025 tercatat sebesar 12,22%, menurun 0,11% dibandingkan Maret 2025 sebesar 12,33%. Penurunan angka kemiskinan di Aceh dipengaruhi oleh beberapa indikator yang cenderung membaik yaitu pertumbuhan ekonomi, terjaganya inflasi, dan berlanjutnya program bantuan sosial.

Penurunan persentase penduduk miskin didorong oleh penurunan kemiskinan di perkotaan. Jika dibandingkan antara periode Maret 2025 dengan September 2025, persentase penduduk miskin di perkotaan menurun dari 8,54% menjadi 8,15%. Di sisi lain dengan perbandingan periode yang sama, persentase penduduk miskin di perdesaan meningkat dari 14,44% menjadi 14,51%. Pada posisi September 2025 jumlah penduduk miskin tercatat 703,33 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar 704,69 ribu jiwa. Jika dilihat lebih rinci, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan menurun sebesar 0,49% dari sebelumnya 174,18 ribu jiwa pada Maret 2025 menjadi 168,71 ribu jiwa pada September 2025. Pada periode yang sama, terjadi kenaikan penduduk miskin di perdesaan sebesar 0,07% dari sebelumnya 530,51 ribu jiwa pada Maret 2025 menjadi 534,56 ribu jiwa pada September 2025.

Grafik 6.2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota

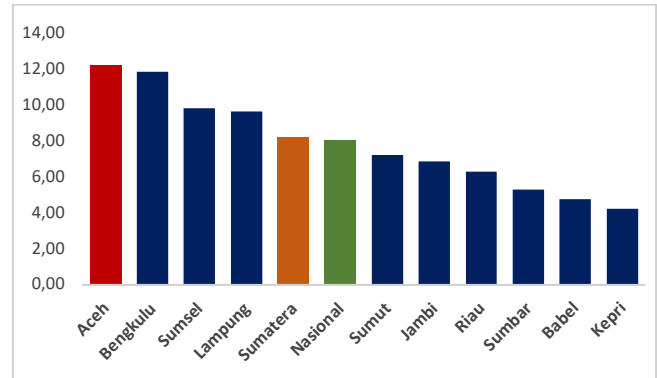


Sumber: BPS, diolah

*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

Data tingkat kemiskinan pada September 2025 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Angka kemiskinan Aceh yang sebesar 12,22%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera yang sebesar 8,25% serta Nasional 8,07%.

Grafik 6.3. Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran masyarakat mampu mengimbangi kenaikan Garis Kemiskinan pada September 2025, meskipun terdapat tekanan inflasi pada kebutuhan dasar. Berdasarkan hasil survei BPS di Provinsi Aceh, garis kemiskinan pada September 2025 dibandingkan dengan Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,75%, sehingga pendapatan per kapita perbulan yang semula Rp676.247,- menjadi Rp715.103,- per kapita per bulan.

Komoditas makanan masih menjadi komponen terbesar pembentuk garis kemiskinan. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa komponen terbesar pembentuk Garis Kemiskinan adalah komoditas makanan dengan sumbangan sebesar 75,32% di perkotaan dan 77,36% di perdesaan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan tongkol/tuna/ cakalang. Sementara peranan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 24,68% di perkotaan dan 22,64% di perdesaan dengan komoditas yang menyumbang

besar terhadap garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Tabel 6.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan

KEMISKINAN (%)	
MARET 2025	12,33
SEPTEMBER 2025	12,22
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)	
MARET 2025	1,836
SEPTEMBER 2025	2,055
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)	
MARET 2025	0,420
SEPTEMBER 2025	0,523

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode September 2025 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. P1 mengalami kenaikan dari 1,836 pada Maret 2025 menjadi 2,055 pada September 2025. Begitu pula dengan P2 yang mengalami kenaikan setelah sebelumnya 0,420 pada Maret 2025 menjadi 0,523 pada September 2025. Naiknya nilai Indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa intensitas dan tingkat keparahan kemiskinan meningkat, sehingga tekanan ekonomi pada kelompok miskin menjadi lebih dalam, meskipun secara persentase jumlah penduduk miskin bisa saja menurun.

Tabel 6.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

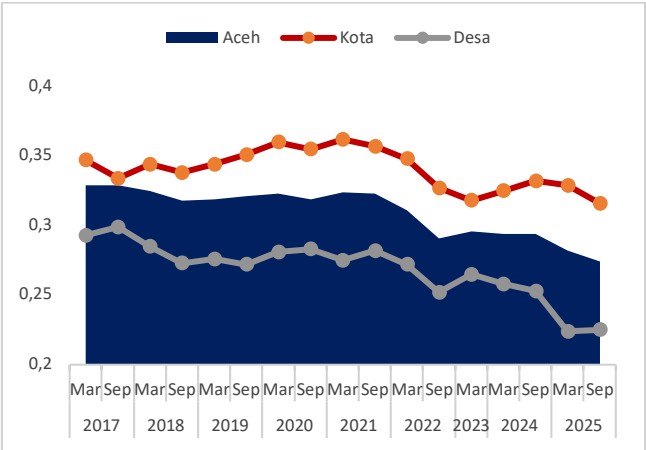
Daerah	2025		2025	
	MARET		SEPTEMBER	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,187	0,258	1,216	0,244
Perdesaan	2,197	0,510	2,527	0,679
Gabungan	1,836	0,420	2,055	0,523

Sumber: Data BPS, diolah

Ketimpangan di perkotaan dan perdesaan mengalami perbaikan. Dalam pengukuran

ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, digunakan indikator Rasio Gini⁵. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada September 2025 sebesar 0,316, sedangkan pada perdesaan sebesar 0,225. Terjadi penurunan rasio baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan pada periode September 2025 dibandingkan Maret 2025. Rasio Gini di Provinsi Aceh secara keseluruhan menunjukkan tren yang menurun di 0,274 pada September 2025, dibandingkan dengan Maret 2025 di 0,282. Sedangkan jika dibandingkan secara *year-on-year* pada September 2024, terjadi penurunan dari 0,294 menjadi 0,274 di September 2025.

Grafik 6.4. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



Sumber: BPS, diolah

*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

⁵Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1.Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi



BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2026 secara keseluruhan diperkirakan tumbuh membaik pada kisaran 3,09%-3,69% (yoy) dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,79% (yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh seiring dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Membaiknya pertumbuhan terutama didorong oleh *peningkatan kinerja sektor konstruksi, seiring dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana, serta peningkatan kinerja transportasi dan perdagangan seiring dengan pulihnya jalur distribusi yang terdampak*.

Membaiknya kinerja perekonomian juga ditopang oleh terjaganya inflasi

7.1. Prospek Makroekonomi

Di sisi global, kinerja pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 masih diperkirakan melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024. Berdasarkan “*World Economic Outlook – Steady amid Divergent Forces*” oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Januari 2026, perekonomian global tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,3% (yoy) atau naik sebesar 0,2% (yoy) dari angka proyeksi awal pada October 2025 sebesar 3,1% (yoy) pada “*World Economic Outlook – Global Economy in Flux, Prospect Remain Dim*” Edisi Oktober 2025. (Tabel 7.1). Secara umum, terdapat revisi atas proyeksi pertumbuhan untuk hampir seluruh negara oleh IMF. Revisi atas ini di antara faktor lainnya, turut didorong oleh penyesuaian proyeksi pertumbuhan Cina yang dikarenakan oleh terdepresiasi Renminbi dan disusul oleh peningkatan ekspor pasca kebijakan *frontloading* yang dilakukan oleh importir Amerika Serikat (AS) pada semester I 2025. Selain dari itu, perluasan kebijakan fiskal di Jerman dan negara-negara anggota Uni Eropa, serta depresiasi mata uang negara berkembang (*Emerging Markets*) turut meningkatkan aktivitas perdagangan global, di tengah masih tingginya tarif resiprokal AS.

Tabel 7.1 Angka Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Tahun 2026 (%yoy)

Wilayah	Okt'25	Jan'26
World Output	3,1	3,3
Advance Economies	1,,6	1,8
United States	2,1	2,4
Euro Area	1,2	1,3
Japan	0,6	0,7
United Kingdom	1,3	1,3
Emerging Market	4,0	4,2
China	4,2	4,5
India	6,2	6,4

Sumber: *International Monetary Fund (IMF)*

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Serikat di tahun 2025 meningkat dari proyeksi sebelumnya pada bulan Juli 2025 sebesar 1,5% (yoy) menjadi 1,6% (yoy) pada Oktober 2025. Revisi atas

angka proyeksi ini turut dipengaruhi oleh peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur *Artificial Intelligence* (AI) dan perluasan kebijakan fiskal. Selain dari itu, peningkatan aktivitas pada sektor keuangan di AS pasca penurunan suku bunga bank sentral amerika *The Federal Reserve* dan perjanjian perdagangan baru dengan negara-negara mitra pasca disahkannya kebijakan tarif resiprokal, turut berkontribusi pada revisi atas proyeksi pertumbuhan Amerika Serikat.

Revisi atas angka proyeksi juga terjadi pada negara-negara maju lainnya seperti negara anggota Uni Eropa dan Inggris. Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi negara anggota *Eurozone*, terdapat revisi atas dari 1,0% (yoy) pada proyeksi Juli 2025 menjadi 1,3% (yoy) pada proyeksi Oktober 2025, atau naik sebesar 0,3% (yoy). Revisi atas angka proyeksi pada negara anggota *Eurozone* tersebut turut dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB pada triwulan III yang sesuai dengan ekspektasi pasar yaitu sebesar 0,2% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,1% (yoy). Selain dari itu, perluasan kebijakan fiskal di Jerman, serta telah disetujuinya perjanjian perdagangan dengan AS pasca kebijakan tarif resiprokal, juga merupakan faktor pada revisi atas proyeksi tersebut. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III diperkirakan tumbuh sebesar 0,1% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,2% (yoy) Perlambatan dapat dikaitkan dengan pelemahan sektor jasa dan konstruksi pada triwulan laporan yang dikarenakan oleh turunnya penerbitan perizinan konstruksi, serta penurunan kapasitas produksi kendaraan bermotor.

Laju pertumbuhan negara berkembang seperti Cina dan India juga mengalami revisi atas dari proyeksi sebelumnya oleh IMF. Laju pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 5,0% (yoy), revisi atas 0,2% (yoy) dengan proyeksi Oktober 2025. Revisi atas proyeksi pertumbuhan Cina ini turut didorong oleh kebijakan fiskal dan insentif perbankan untuk investasi. Di sisi lain, laju pertumbuhan India pada tahun 2025 diperkirakan berada pada angka 7,3% (yoy) atau lebih tinggi sebesar 0,7% (yoy) dari proyeksi Oktober 2025

sebesar 6,6% (yoy), lebih baik dibandingkan revisi proyeksi Cina dan negara-negara maju. Tetap tingginya proyeksi pertumbuhan India, sejalan dengan kinerja perekonomian India pada triwulan III dan IV 2025 di atas ekspektasi pasar.

Pada proyeksi inflasi dunia 2026, tidak terdapat banyak perubahan dibandingkan proyeksi IMF pada bulan Oktober 2025. Angka Inflasi dunia diperkirakan akan terus turun hingga 2027. Rata-rata inflasi tahunan global pada tahun 2026 diperkirakan akan berangsur turun ke angka 3,8% (yoy), dan akan turun ke 3,4% (yoy) di tahun 2027. Penurunan tersebut sejalan dengan tren penurunan permintaan global barang konsumsi di tengah konflik global dan perang dagang yang terjadi. Kendati demikian, terdapat potensi revisi atas pada inflasi global pada pertengahan tahun 2026, seiring dengan perkembangan konflik di timur tengah yang berpotensi mendorong harga energi global.

Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap tumbuh kuat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang baik. Inflasi nasional pada tahun 2025 juga diproyeksikan akan tetap terkendali dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Angka tersebut dapat dicapai dengan dukungan konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Walaupun demikian, secara umum terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia di tahun 2026, baik dari sisi global maupun sisi domestik.

Dari sisi tantangan global, perekonomian Indonesia diperkirakan akan masih menghadapi berbagai tantangan di antara lainnya yaitu: I. Meningkatnya potensi konflik geo-politik, khususnya di timur tengah yang mendorong harga energi global; II. Tingginya utang publik dunia, baik di negara maju maupun *Emerging Markets*; III. Meningkatnya volatilitas pasar uang global, khususnya risiko dari lembaga keuangan non-bank (*Non-Bank Financial Institutions*).

Dari sisi tantangan domestik, perekonomian Indonesia diperkirakan akan dihadapi tantangan seperti tren pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke informal. Selain dari itu dampak berkelanjutan dari kebijakan realokasi anggaran juga diperkirakan berdampak pada sektor konstruksi dan sektor penyedia jasa akomodasi, makanan dan minuman.

Perekonomian Aceh pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh terbatas pada kisaran 3,09% - 3,69% (yoy), di tengah *scarring effect* dampak bencana hidrometeorologi. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan akan ditopang oleh peningkatan kinerja konsumsi pemerintah seiring dengan *base effect* terkontraksinya kinerja konsumsi pemerintah di tahun 2025 akibat kebijakan realokasi dan efisiensi anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, kinerja investasi juga diperkirakan meningkat seiring dengan proses pemulihan dan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terdampak bencana. Komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap resilien. Hal ini turut didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi sesuai pada target nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Kinerja ekspor di tahun 2026 diperkirakan masih terbatas, seiring dengan termoderasinya permintaan impor batu bara India akibat *shifting* permintaan ke batu bara Russia dengan kalori lebih tinggi. Di sisi lain, terdapat oversupply batu bara dunia secara umum yang turut menurunkan harga batu bara dunia. Di sisi lain, ekspor kopi dan CPO juga diperkirakan masih terhambat akibat terendahnya perkebunan khususnya di Kab. Aceh Tengah dan Aceh Tamiang. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia pada bulan *Commodity Markets Outlook* bulan Oktober 2025, harga acuan batubara (berdasarkan *Australian Benchmark Coal Price*) diperkirakan akan terus turun hingga -7% (yoy) pada akhir 2026, sejalan dengan tren penurunan yang terjadi sejak pertengahan tahun 2025. Harga kopi arabika juga diperkirakan akan berangsur turun dari harga US\$8.00/Kg di tahun 2025 ke harga US\$7.25/Kg di

tahun 2026 dan ke harga US\$7.00/Kg di tahun 2027, sejalan dengan tren penurunan harga yang terjadi sejak pertengahan tahun 2025. Turunnya harga kopi arabika dapat dikaitkan dengan, peningkatan kapasitas produksi di Brazil, serta perbaikan kondisi cuaca di Amerika Tengah dan Selatan. Kendati demikian, harga komoditas minyak sawit (CPO), diperkirakan meningkat dari US\$1.020/Mt di tahun 2025, menjadi US\$1.050/Mt di tahun 2026, dan terus meningkat ke US\$1.062/Mt di tahun 2027.

Sementara itu, dari sisi penawaran pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan masih ditopang oleh kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU) strategis dengan pangsa seperti LU Pertanian, LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Secara umum, peningkatan kinerja LU Pertanian utamanya diperkirakan akan didorong oleh normalisasi kapasitas produksi pasca rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana. Selain dari itu, kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perluasan lahan panen diperkirakan akan turut mendorong angka pertumbuhan LU Pertanian. Pembangunan kembali dan rekonstruksi fasilitas umum, jalanan, dan jembatan yang terdampak bencana juga diperkirakan akan turut mendorong kinerja LU Konstruksi secara keseluruhan di tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kinerja LU Perdagangan, dan LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan akan membaik, seiring dengan normalisasi mobilitas masyarakat dan aktivitas perdagangan pasca selesainya progres rekonstruksi jalanan dan jembatan yang terdampak bencana.

7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* bulan Januari 2026 yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF), rata-rata inflasi global pada tahun 2025 diproyeksikan berada di level 4,1% (yoy) dan diperkirakan terus menurun hingga menyentuh 3,8% (yoy) pada tahun 2026. Penurunan ini diprediksi berlanjut hingga tahun 2027 dengan

tingkat inflasi sebesar 3,4% (yoy). Meskipun tren penurunan ini telah berlangsung sejak tahun 2022 pasca-pandemi COVID-19, masih terdapat risiko adanya tekanan inflasi. Risiko utama berasal dari eskalasi ketegangan geopolitik global, termasuk perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, serta konflik di Timur Tengah yang memperburuk ketidakstabilan global. Dari sisi domestik, laju inflasi nasional diperkirakan akan tetap terkendali dan bergerak kembali dalam rentang sasaran target inflasi sebesar 2,5% $\pm$ 1% (yoy).

Secara keseluruhan, laju inflasi Provinsi Aceh sepanjang tahun 2026 diproyeksikan tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran nasional 2,5% $\pm$ 1% (yoy). Dari kelompok *Volatile Food*, inflasi diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh percepatan pemulihan jalur distribusi, perbaikan infrastruktur pertanian, serta program bantuan rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana dari pemerintah. Selain itu, penyelesaian pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh pada tahun ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik kedepannya. Program Kementerian Pertanian yang mencakup pemulihan lahan, pemberian benih unggul, dan penyediaan pupuk juga diproyeksikan mempercepat pemulihan sentra produksi di Aceh pasca bencana hidrometeorologi akhir 2025. Pada kelompok *Administered Prices*, tekanan inflasi diperkirakan tetap ada namun tidak setinggi kenaikan pada tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemangkasan kuota BBM bersubsidi oleh BPH Migas untuk tahun anggaran 2026, di mana kuota Peralite berkurang sebesar 6,28% dan Solar sebesar 2,32%. Namun, laju kenaikan yang lebih tinggi dapat ditahan oleh kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok. Sehingga tekanan inflasi akan sedikit lebih stabil. Sementara itu, pada kelompok *Core Inflation*, tekanan diperkirakan berasal dari peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2026 sebesar 6,7%. Selain itu, harga emas perhiasan yang diproyeksikan terus menguat akibat konflik geopolitik global yang masih terus

berlangsung masih menjadi risiko yang menekan inflasi kelompok ini. Secara umum, inflasi Provinsi Aceh pada tahun 2026 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025 akibat fase pemulihan pasca bencana.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh terus berupaya dalam mengendalikan inflasi melalui berbagai program strategis, seperti Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya ini dilakukan dengan menggunakan strategi 4K, yang mencakup penjaminan Ketersediaan Pasokan, pemastian Keterjangkauan Harga, optimalisasi Kelancaran Distribusi, serta penguatan Komunikasi Efektif terutama antar lembaga. Melalui sinergi kebijakan tersebut, diharapkan dapat meredam gejolak harga di pasar sehingga laju inflasi tetap terjaga dalam sasaran target nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$.

7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

1. **Restore Faster, Build Back Better: Mempercepat progres rekonstruksi jalur distribusi utama melalui prioritas koridor dan peningkatan kualitas infrastruktur.** Hal ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan pada sejumlah titik strategis yang menjadi tumpuan logistik antar kabupaten dan antar provinsi, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum pada titik yang berpotensi mengalami kerusakan berulang. Implementasi kebijakan ini dapat dilakukan dengan penetapan target pencapaian lintas perangkat daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Dinas PUPR Provinsi, Balai Wilayah Sungai) untuk: (i) Menetapkan sejumlah koridor distribusi prioritas (akan dijadikan prioritas utama rekonstruksi), (ii) Menetapkan kontrak kerja berdasarkan *output* dan tenggat waktu, (iii) Menerapkan standar teknis konstruksi adaptis (drainase, proteksi lereng, elevasi badan jalan, desain jembatan tahan arus, dll.) agar risiko *shock* berulang tidak terjadi.
2. **Faster Recovery, Higher Harvest: Mempercepat rehabilitasi lahan pertanian untuk mendorong sektor pertanian dan mengendalikan inflasi.** Kebijakan diarahkan pada dua kluster: (a) pemulihan produksi melalui rehabilitasi irigasi/alsintan, bantuan benih cepat tanam, pemulihan lahan pascabanjir, serta restocking perikanan/ternak; (b) manajemen pasokan melalui penguatan operasi TPID berbasis data stok dan distribusi antardaerah untuk menjaga stabilitas harga. Relevansinya meningkat mengingat inflasi tahunan Aceh masih tinggi pada Januari 2026.
3. **Public-Private Partnership: Menjadikan proyek rekonstruksi infrastruktur dan fasilitas umum sebagai salah satu jalan (*Pipeline*) untuk meningkatkan kinerja investasi.** Pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak, dapat dijadikan kesempatan dan momen untuk menyajikan sebagian dari proyek rekonstruksi untuk turut dibangun dan didukung oleh pihak swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyajikan Proyek Siap Eksekusi (desain matang, kepastian lahan, skema pendanaan jelas: APBD/DAK/KPBU/dll.) yang berfokus pada rekonstruksi untuk dipresentasikan ke calon investor.
4. **Risk-Adjusted Export Strategy: Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan ekspor komoditas non-tambang.** Struktur ekspor Aceh masih sangat bergantung pada komoditas batu bara, dengan pangsa sebesar 71,07% dari total ekspor. Selain dari itu, ekspor komoditas hanya terkonsentrasi pada satu pasar, yaitu pasar India dengan pangsa 90,17% dari total ekspor batu bara. Hal ini menyebabkan kinerja ekspor Aceh sangat rentan terhadap pergerakan harga batu bara global dan produktivitas lahan pertambangan. Pelemahan permintaan di India juga akan langsung menekan kinerja ekspor Aceh secara keseluruhan. Kebijakan ekspor di tahun

2026, perlu menggeser strategi dari “*Volume Driven*” khususnya pada sektor tambang, menjadi *Risk-Adjusted Export Strategy* dengan mengedepankan penguatan ekspor komoditas non-tambang unggulan Aceh seperti Kopi, Nilam, dan Minyak Kelapa Sawit (CPO). Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan: (i) Membantu Satuan Tugas (Satgas) Diversifikasi Ekspor, untuk mengkurasi unit usaha, mencari investor, serta penajakan dan pembukaan pasar internasional baru; (ii) Penguatan komoditas ekspor non-tambang dengan optimalisasi fasilitas pendukung. Hal ini dapat dilakukan dengan optimalisasi ekspor langsung via pelabuhan Aceh untuk ekspor CPO, standarisasi mutu dan kemasan, serta dan peningkatan sarpras unit usaha untuk pengolahan Kopi, Nilam, dan Perikanan.

5. **Peningkatan daya beli masyarakat melalui strategi *Cash-for-Work* untuk proses pemulihan dampak bencana.** Bencana hidrometeorologi berdampak pada kelangsungan hidup dan mata pencarian 2.584.067 orang masyarakat dan sejumlah 670.826 keluarga di 18 Kabupaten/Kota. Pemerintah dapat melakukan pemulihan/pembersihan daerah yang terdampak bencana dengan menerapkan strategi *cash-for-work* dengan memanfaatkan tenaga kerja setempat untuk membantu mempercepat proses pemulihan. Dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal, hal ini juga diperkirakan akan turut memulihkan pendapatan masyarakat setempat yang hilang akibat bencana tersebut.
6. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan dan mendorong peningkatan nilai tambah UMKM.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM

yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2026. Penyaluran KUR dan UMI tentunya harus turut diiringi dengan pengembangan kapabilitas UMKM yang terlibat, khususnya pada literasi keuangan dan pembukuan. Dalam hal ini, digitalisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS dan Mesin POS (*Point-of-Sales*) juga akan mempermudah pelaku usaha dalam proses pembukuan dan pencatatan keuangan usaha. UMKM dengan pencatatan dan pembukuan keuangan yang baik tentunya akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk memperluas skala usahanya.

Inflasi

Pada tahun 2026, tekanan inflasi diperkirakan akan menurun dibandingkan tahun 2025. Meskipun demikian, diperlukan langkah-langkah antisipatif yang bersifat struktural maupun musiman (*seasonal*) dalam memastikan inflasi tetap berada pada rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$, terutama dalam fase pemulihan pasca-bencana. TPID Provinsi Aceh secara konsisten mengimplementasikan berbagai program pengendalian inflasi yang berpedoman pada strategi 4K, antara lain:

1. **Ketersediaan Pasokan** antara lain melalui pada penguatan koordinasi antar lembaga dalam mempercepat rehabilitasi pascabencana serta akselerasi KAD yang menghubungkan wilayah sentra dan non-sentra. Dari sisi produksi, upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui optimalisasi *Good Agriculture Practices* (GAP), replikasi *best practice*, dan adopsi teknologi pertanian modern (termasuk *urban farming*), yang didukung oleh pemberian bantuan sarana prasarana di sisi hulu. Langkah ini juga dilakukan dengan fasilitasi skema *contract farming* dan hilirisasi pangan guna menjamin kepastian pasar, kontinuitas pasokan, serta stabilitas harga.
2. **Keterjangkauan Harga** yang difokuskan pada stabilisasi pasar melalui operasi pasar murah (SPHP dan GPM) di 23 kabupaten/kota, yang dilaksanakan pada waktu yang tepat dan lokasi sasaran. Upaya ini diperkuat dengan pemberian

Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bagi komoditas pangan bergejolak (*volatile food*) serta pelaksanaan sidak secara berkala untuk memastikan kestabilan harga. Dari sisi produksi, dilakukan penyaluran bantuan dan peningkatan kapasitas petani, khususnya di wilayah terdampak bencana, serta sinergi dengan BUMN dalam menjamin ketersediaan energi dan cadangan pangan pemerintah.

3. **Kelancaran Distribusi** dengan fokus utama peningkatan konektivitas antar daerah dalam mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan. Upaya ini diimplementasikan melalui optimalisasi pemanfaatan tol laut guna mengefisienkan distribusi antarpulau, serta fasilitasi kerja sama antara UMKM pangan dengan *platform e-commerce* untuk memperluas jangkauan pasar. Langkah ini disempurnakan dengan optimalisasi pemanfaatan sarana *cold storage*, khususnya bagi komoditas perikanan dan cabai, guna menjaga kualitas produk dan memperpanjang masa simpan di sepanjang rantai pasok.
4. **Komunikasi Efektif** melalui peningkatan akses informasi dan transparansi harga antar daerah, optimalisasi koordinasi TPID, serta pengendalian ekspektasi inflasi. Dalam hal transparansi, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) dimanfaatkan secara optimal sebagai referensi utama perumusan kebijakan. Di sisi lain, penguatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kabupaten/Kota, penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM), serta pelaksanaan *capacity building*. Selain itu, strategi komunikasi efektif juga dilengkapi dengan sinergi aktif bersama media massa guna menjaga ekspektasi masyarakat tetap stabil.
5. **Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)** diimplementasikan melalui program jangka pendek serta menengah-panjang. Pada jangka pendek, strategi difokuskan pada stabilisasi harga melalui pelaksanaan operasi pasar murah dan sidak

pasar, perluasan penyaluran SPHP, serta penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra maupun interregional dengan memanfaatkan jalur distribusi BUMN logistik. Langkah ini didukung oleh pelaksanaan *business matching* komoditas pangan, kajian integrasi pasar induk dan penerapan DMO, serta pengembangan *Early Warning System* (EWS) dan Protokol Manajemen Inflasi. Sementara itu, program jangka menengah-panjang diarahkan pada penguatan ketahanan struktural melalui *piloting* benih hortikultura tahan cuaca, penerapan GAP berbasis agroklimat, serta perluasan *awareness* asuransi pertanian. Upaya ini disempurnakan dengan dukungan sarana pascapanen, percepatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta program pompanisasi dan pembangunan konservasi air di wilayah terdampak bencana.

6. **Mendorong penguatan ketahanan pangan Aceh** yang dilakukan melalui penguatan kelembagaan kelompok tani guna meningkatkan produktivitas dan daya tawar petani. Peran BUMDes, Koperasi, serta BUMD turut dioptimalkan sebagai *buffer entity* dalam menyerap surplus produksi maupun melakukan stabilisasi pasokan saat terjadi kelangkaan. Kualitas data pangan ditingkatkan untuk mendukung efektivitas KAD dan akurasi kebijakan, yang diperkuat dengan pemetaan secara komprehensif rantai pasok pangan dari hulu ke hilir. Seluruh upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi yang didukung oleh perluasan akses pembiayaan di sektor pangan.

DAFTAR ISTILAH

Administered prices	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Agus Chusaini

KOORDINATOR PENYUSUN

Hendy Hadiyan

TIM PENULIS

Hafidz Yudhansyah

Muhammad Raziq Ilmi

Muhammad Kahfi

Hafidz Bramandito

Hana Nabillah

Dwina Olivia Rahmi

Kristina Panduwinata

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

Softcopy dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Aceh-Februari-2026.aspx>.